



BORNEO HUMANIORA

Jurnal Borneo Humaniora adalah *jurnal* yang memuat artikel-artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, diadopsi dalam berbagai aktivitas penelitian dosen. Yang tergolong dalam rumpun ilmu humaniora yaitu: Ekonomi, Teologi, Filsafat, Hukum, Sejarah, Filologi, Bahasa, Budaya & Linguistik (Kajian bahasa), Kesusastraan, Kesenian, dan Psikologi. Artikel-artikel yang dipublikasikan di Jurnal BORNEO HUMANIORA (p-ISSN 2615-4331 dan e-ISSN 2599-3305) yang diterbitkan oleh LPPM UBT meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli, artikel ulasan ilmiah bersifat baru, atau komentar dan kritik terhadap tulisan maupun dalam terbitan berkala ilmiah lainnya.

Untuk menunjang kelangsungan eksistensi Jurnal Borneo Humaniora redaksi mengundang para peneliti untuk mempublikasi artikel hasil penelitian di bidang Ilmu-ilmu Humaniora.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Jurnal Borneo Humaniora dengan baik.

JURNAL BORNEO HUMANIORA terbit dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan.

Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan jurnal ini. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Jurnal ini.

Semoga Jurnal Humaniora tentang ilmiah ini dapat diambil hikmahnya dan manfaatnya sehingga memberikan inspirasi kepada pembaca.

Tarakan, Februari 2020

Penyusun



DEWAN REDAKSI

BORNEO HUMANIORA

Pelindung

Prof. Dr. Adri Patton, M.Si
Rektor Universitas Borneo Tarakan
Dr.Ir. Adi Sutrisno, M.P
Wakil Rektor 1 Universitas Borneo Tarakan

Penanggung Jawab

Dr. Syahrhan, S.E.,M.Sc
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Borneo Tarakan

Pimpinan Redaksi

Widyastuti Cahyaningrum (FE-UBT)

Editor

Atika Dini Savitri (LPPM-UBT)

Plagiarisme

Eko Prihartanto (FT-UBT)

Reviewer Mitra Bestari

Arbain (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda)
Dedi Rahman Nur (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda)
Dienny Redha Rahmani (Universitas Muhammadiyah Banjarmasin)
Muhammad Irawan Saputra (Universitas Brawijaya)

Jurnal

BORNEO HUMANIORA

Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DEWAN REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN PENULISAN	v
Donna Rhamdan, Jumriani, Diana Perminas, Satriani Deskripsi Hubungan Masyarakat Dengan Sekolah Di SDIT Ulul Albab Tarakan	01-07
Yusuf Permana, Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Agus Tri Darmawanto Kajian Implikasi Neoliberal Pada Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Dalam Konteks Pergeseran Peran: Sebuah Perspektif Ekonomi	09-12
Adhe Zahrotul Ummami Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Operasi Hitung Campuran Menggunakan Model <i>Think Pair Share</i> Siswa Kelas IV-A SDN Utama 2 Tarakan Tahun Pelajaran 2018/2019	13-18
Marthen B. Salinding, Basri Model Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara	19-27
Harum Mulia Putra Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota POLRI	29-32
Nia Kurniasih Suryana, Eliaser Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Desa Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau	33-41

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL BORNEO HUMANIORA

PERSYARATAN UMUM. Naskah berupa tulisan asli mengenai hasil suatu penelitian, catatan penelitian, analisis kebijakan, dan ulasan (dalam bentuk *review*) dalam bahasa Indonesia yang belum pernah dimuat dalam jurnal ilmiah internasional maupun nasional.

FORMAT TULISAN. Naskah diketik dua spasi pada kertas HVS ukuran A4 dengan *margins Top: 1", Left: 1.5", Bottom: 1", Right: 1"* dan huruf bertipe *Times New Roman* berukuran 11 *point*, dan spasi 1. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan Tabel dikelompokkan bersama di akhir naskah pada lembar terpisah.

Catatan hasil penelitian dan ulasan ditulis sebagai naskah sinambung tanpa subjudul metode penelitian serta Hasil dan Pembahasan. Catatan hasil penelitian dan ulasan ditulis tidak lebih dari 10 halaman (termasuk Gambar dan Tabel). Isi dibuat 2 kolom.

Format tulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. **Judul** : ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, judul artikel harus spesifik dan efektif.
2. **Nama Lengkap Penulis** : Nama penulis lengkap tanpa gelar, penulis untuk korespondensi dilengkapi dengan nomor telepon/*handphone*, e-mail, dan fax.
3. **Nama Lembaga/Institusi** : Disertai alamat lengkap dengan nomor kode pos.
4. **Abstrak** : Dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing tidak lebih dari 250 kata.
5. **Kata Kunci (Keywords)**: Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas tiga sampai lima kata yang diletakkan di bawah abstrak/*abstract* dan kata kunci dituliskan menurut abjad.
6. **Pendahuluan** : Berisi latar belakang penelitian yang dilakukan, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Pada pendahuluan ini juga disertakan tujuan penelitian yang dituliskan pada akhir paragraf.
7. **Metode Penelitian** : Berisi bahan dan alat, lokasi penelitian, metode/cara pengumpulan data (survey atau perancangan percobaan), dan analisa data.
8. **Hasil dan Pembahasan** : Disajikan dalam bentuk teks, Tabel maupun Gambar. Pembahasan berisi interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dan dikaitkan dengan hasil-hasil yang pernah dilaporkan (penelitian sebelumnya).
9. **Kesimpulan** : Memuat makna hasil penelitian, jawaban atas hipotesis atau tujuan penelitian.
10. **Ucapan Terima Kasih (bila diperlukan)** : Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.
11. **Daftar Pustaka** : Sesuai dengan yang diacu dalam tubuh tulisan dan menggunakan pustaka primer minimal 80% dari jurnal. Cara penulisannya seperti contoh berikut ini:

Penulisan acuan dari **jurnal** :
Gutierrez-Gonzalez JJ, Guttikonda SK, Tran LSP, Aldrich DL, Zhong R, Yu O, Nguyen HT, and Sleper DA, 2010 : Differential Expression of Isoflavone Biosynthetic Genes in Soybean During Water Deficits, *Plant Cell Physiol.* 51(6): 936-948.

Penulisan acuan dari **buku** :

Gray JS, Elliott M. 2009. *Ecology of Marine Sediment*. Oxford (GB): Oxford University Press.

Penulisan acuan dari **prosiding** :

McKenzie LJ, Yoshida RL. 2009. Seagrass-watch. In: *Proceedings of a Workshop for Monitoring Seagrass Habitats in Indonesia*. The Nature Conservancy, Coral Triangle Center, Sanur, Bali, 9th May 2009.

Penulisan acuan dari **skripsi/tesis/disertasi** :

Sari, Paska P. 2000. Reproduksi Ikan "Shirogisu" *Sillago japonica* (Temminck dan Schlegel) Di Perairan Teluk Bura, Nagasaki, Jepang. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Penulisan acuan dari **internet** :

Savage E, Ramsay M, White J, Bread S, Lawson H, Hunjan R, Brown D. 2005. Mumps outbreaks across England and Wales in 2004: observational study. *BMJ* [Internet]. [diunduh 2010 Des 28]; 330 (7500): 1119-1120. Tersedia pada:<http://bmj.bmjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1119>.

PENGIRIMAN. Penulis diminta mengirimkan satu eksemplar naskah asli beserta dokumen (*softfile*) dari naskah asli tersebut yang harus disiapkan dengan program *Microsoft Word*. Naskah dan *softfile* dikirimkan kepada:

Redaksi Jurnal BORNEO HUMANIORA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Borneo Tarakan (LPPM-UBT)

Gedung Rektorat Lantai 3 Jalan Amal Lama No. 01, Kelurahan Pantai Amal,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Telp 08115307023; Faks: (0551) 2052558.

DESKRIPSI HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN SEKOLAH DI SDIT ULUL ALBAB TARAKAN

DESCRIPTION OF PUBLIC RELATIONS WITH SCHOOLS IN SDIT ULUL ALBAB TARAKAN

Donna Rhamdan¹, Jumriani², Diana Perminas³, Satriani⁴

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Borneo Tarakan
Email: donna.rhamdan@borneo.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah di SDIT Ulul Albab Tarakan. Pendekatan penelitian dengan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah ini telah melakukan cara yang sesuai untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi yang nyata melalui media sosial, sehingga peran humas di SDIT Ulul Albab Tarakan yaitu menjaga hubungan yang baik. Tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Sekolah telah mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa respon positif yang baik dan kepercayaan masyarakat kepada Sekolah ini. Bentuk penyelenggaraan humas merupakan fungsi dari humas dengan sekolah yaitu untuk mengatasi persoalan hubungan masyarakat dengan sekolah. Di sekolah ini sudah berjalan dengan baik fungsi humas sehingga masyarakat tidak keberatan dan tidak ada yang komplain serta masyarakat menerima dengan baik. Manfaat dari bentuk kerjasama humas dengan sekolah sudah berjalan dengan baik serta bentuk atau teknik dalam pelaksanaan program kerja dari humas berkesinambungan.

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat Dengan Sekolah; Pelaksanaan Humas Di Sekolah

ABSTRACT

This study aims to determine the public relations with school at SDIT Ulul Albab Tarakan. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this study through observation, interviews, and documentation studies. The results showed that in the school had done an appropriate way to get support and sympathy from the public, by providing real information through social media, so that the role of public relations at SDIT Ulul Albab Tarakan was to good cooperation. The purpose of public relations with schools is to get support from the publics, and School has received support from the public in the form of a good positive response and public trust in SDIT Ulul Albab Tarakan. The form of public relations implementation is a function of public relations with schools, namely to overcome the problem of public relations with schools to achieve common goals and the has gone well so that the publics no one complains and the publics accepts well. The benefits of the form of public relations collaboration with schools have been going well and the form or technique in the implementation of work programs from public relations continuously.

Keyword: Public Relations With School; Implementation Of Public Relation At School

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi bagi suatu negara agar dapat menjadi negara maju. Melalui pendidikan dapat dihasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang dapat membawa perkembangan bagi suatu negara. Pendidikan juga mempengaruhi pandangan suatu bangsa terhadap

suatu negara karena suatu bangsa dikenal dan dipandang berdasarkan karakteristik dari bangsanya. Pendidikan tidak hanya berfokus kepada pembangunan aspek *kognitif* (pengetahuan) saja, namun juga memperhatikan perkembangan aspek *afektif* (sikap) dan *psikomotorik* (keterampilan) sehingga diharapkan nantinya

seorang individu yang cerdas secara intelektual, memiliki tata krama yang baik, serta memiliki keterampilan yang dapat diandalkan.

Pelaksanaan pendidikan tentunya tidak lepas dari adanya kegiatan pembelajaran yang menunjang jalannya pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui pendidikan merupakan wadah yang mewadahi terjadinya proses belajar mengajar atau yang disebut dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas sehari-hari yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan. Sekolah dirancang untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik. Dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik, sekolah perlu meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan adanya program pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pihak sekolah.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut diperlukan adanya kerjasama antara semua *stakeholder* yang akan mempermudah meningkatkan kualitas sekolah.

Peran hubungan masyarakat sangat penting bagi sebuah organisasi atau lembaga termasuk hubungan masyarakat dengan sekolah. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab *stakeholder*, maka diperlukan keterbukaan. Perencanaan kegiatan sekolah perlu disampaikan dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan memberikan dukungan. Oleh sebab itu setiap sekolah harus memiliki manajemen humas yang berfungsi untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat yang ada diluar sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah dengan masyarakat termasuk salah satunya ialah orang tua siswa yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut. Semua perencanaan kegiatan diperlukan adanya humas dengan sekolah untuk memudahkan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

Informasi yang diberikan dapat berupa program-program sekolah maupun masalah-masalah yang sedang dihadapi sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sekolah. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di sekolah dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu setiap sekolah harus memiliki manajemen humas yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Manajemen humas dengan sekolah merupakan segala rangkaian kegiatan sekolah dengan masyarakat bertujuan menunjang pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun penelitian bertujuan mengetahui hubungan masyarakat dengan SDIT Ulul Albab Tarakan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih dan menempatkan lokasi penelitian di sekolah berprestasi. Pemilihan ini didasarkan dengan alasan untuk mendapat informasi mengenai objek materi yang diteliti dan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah dilakukan beberapa pertimbangan, sekolah yang dijadikan subjek penelitian yaitu SDIT Ulul Albab Tarakan. Adapun waktu penelitian pada tanggal 4 Desember 2018.

2. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh berdasarkan sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber dan berbagai cara. Menggunakan teknik observasi wawancara, dan studi dokumentasi.

Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data tersebut dapat dilihat dibawah ini:

a. Observasi

Faisal dalam Sugiyono (2015: 310) observasi digolongkan dalam tiga macam yaitu *participant observation*, *overt observation* and *covert observation*, *unstructured observation*.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu observasi terus terang atau terbuka. Dalam hal ini, peneliti secara langsung melakukan penelitian kepada sumber data, peneliti sedang melakukan penelitian. Peneliti mengobservasi masing-masing satu sekolah untuk satu lokal, diantaranya Lokal A 2016 di SDIT Ulul Albab

Tarakan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu aktivitas percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud tertentu yang terdiri dari orang yang mewawancarai yang mengajukan pertanyaan, kemudian dijawab oleh orang yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi untuk melengkapi mendapatkan data Sehingga peneliti tidak hanya melakukan observasi dan wawancara saja melainkan mengumpulkan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian baik berupa sumber tertulis dan gambar.

d. Prosedur Penelitian

Untuk memperoleh hasil analisis data, peneliti melakukan tahap-tahap sebagai berikut: Dalam penelitian yang pertama kali dilakukan adalah melakukan observasi, dicatat maupun dijadikan data umum. Membuat pertanyaan tentang permasalahan yang akan diobservasi dan melakukan validasi pertanyaan bersama dosen pengampu untuk uji kelayakan pertanyaan. Melakukan observasi di Sekolah Dasar yang telah ditentukan untuk mendapatkan data umum. Data umum penelitian ini adalah hasil wawancara dari materi yang telah ditetapkan. Data tersebut dianalisis dan dibahas serta pada akhirnya disimpulkan.

e. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen, penentuan pola analisis data tergantung jenis data yang dikumpulkan. Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka data yang diperoleh adalah *textual* dan pola analisis yang dilakukan adalah analisis non-statistik. Data yang dianalisis menurut isinya, maka teknik analisis yang dapat digunakan adalah teknik *content analysis*. Menurut Burhan (2008:231) analisis isi adalah teknik penelitian membuat inferensi yang dapat ditiru, dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi pada penelitian ini peneliti menganalisis humas di SDIT Ulul Albab Tarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori, hubungan yang harmonis humas dengan sekolah ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari betapa pendidikan sangat penting. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah ini maka dapat diketahui bahwa cara menjaga hubungan masyarakat dengan sekolah agar tetap terjalin baik yaitu dengan menjaga komunikasi agar tetap berjalan baik antara sekolah dan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga membantu sekolah agar tetap terjalin silaturahmi yang baik. Jadi sekolah ini sudah menerapkan cara menjaga hubungan masyarakat dengan sekolah agar tetap terjalin baik.

Berdasarkan teori Mulyasa (2011: 50), mengatakan bahwa masyarakat dan sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut, program kerjasama masyarakat dengan sekolah memberikan dampak positif yaitu sekolah lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang sekolah dan dari program sekolah yang telah dilakukan, sekolah lebih merasakan respon positifnya dari masyarakat dibandingkan respon negatifnya. Jadi sekolah tersebut sudah merasakan respon positif tentang program kerjasama antara hubungan masyarakat dengan sekolah.

Berdasarkan teori Mulyasa (2011: 51), mengemukakan agar tercipta suatu hubungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan sekolah, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan sekolah yang bersangkutan. Gambaran tentang sekolah diberitahukan melalui televisi, dan laporan tahunan. Berdasarkan hasil wawancara di sekolah tersebut mendapatkan dukungan masyarakat dalam melaksanakan mutu pendidikan adalah dengan memberikan informasi nyata serta tidak dibuat-buat maka akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau terkait dengan melaksanakan mutu pendidikan, berawal dari hal-hal yang masyarakat rasakan dari sekolah, jadi dengan adanya kepercayaan masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tersebut serta upaya yang dilakukan humas sekolah meninformasikan kepada publik khususnya dalam penyelenggaraan humas sekolah. Dengan menggunakan media sosial salah satunya media sosial facebook dimana sekolah dapat

memanfaatkan media tersebut untuk memperkenalkan sekolah tersebut kepada masyarakat serta sekolah mempunyai waka humas dan waka humas tersebut tidak mempunyai kerja sampingan dan hanya fokus di bagian humas saja. Jadi, sekolah sudah melakukan cara yang sesuai untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu dengan memberikan informasi yang nyata, sehingga terciptanya komunikasi yang baik. Dalam menarik simpati masyarakat dengan menggunakan media sosial untuk memperkenalkan sekolah tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan teori Rugaiyah dalam Fadiyah (2016:13) hubungan antara sekolah dengan masyarakat di definisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan pengertian warga masyarakat terkait kebutuhan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya memajukan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan sekolah adalah terlaksananya peraturan sekolah, dengan ikut serta untuk melaksanakan dan ikut andil dalam peraturan yang telah ditetapkan contohnya seperti peraturan dimana siswa di sekolah tersebut dilarang untuk membawa uang saku saat kesekolah dan pihak masyarakat pun mengikuti aturan tersebut. Jadi masyarakat mendukung pelaksanaan peraturan sekolah misalnya siswa dilarang untuk membawa uang saku kesekolah, dan sekolah sudah mendapatkan persetujuan dari warga dan masyarakat sekitar sekolah tentang peraturan tersebut.

Pasal 4 peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1992 yang meliputi 1) melibatkan wali murid dalam suatu hal yang menunjang pelaksanaan pendidikan, 2) pemberian bantuan tenaga ahli, 3) mengusahakan agar tokoh-tokoh masyarakat dapat turut menunjang pelaksanaan pendidikan, 4) pengadaan dana dan memberi bantuan yang berupa wakaf, beasiswa, hibah, pinjaman dan bentuk-bentuk lain, 5) peyediaan buku pelajaran serta peralatan pendidikan lain untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut, bentuk hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat sudah terjalin salah satunya yaitu kontribusi masyarakat sekitar dan orang tua murid dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sekolah serta bentuk kesepakatan orang tua murid

dalam hal peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah. Bentuk pelaksanaan program kerja sekolah ada yang terlaksana secara rutin, secara tahunan dan berkelanjutan, jenis-jenis kegiatan antara masyarakat dengan sekolah yang telah terlaksana yaitu berupa kegiatan tahunan yaitu pemotongan hewan kurban, kemudian mempunyai program di bulan Ramadhan misalnya siswa membagikan takjil langsung kerumah-rumah tetangga. Selain itu juga sekolah telah melaksanakan kegiatan berupa bantuan misalnya kalau ada musibah contohnya kebakaran, bebarapa siswa melihat langsung dan memberikan bantuan langsung. Jadi bentuk hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat sudah terjalin dengan baik dan bentuk pelaksanaan program kerja dari humas sekolah telah berkesinambungan.

Visi sekolah tersebut adalah menjadi sekolah yang terbaik dan Islami di Kalimantan Utara. Misi sekolah tersebut adalah 1) mampu menumbuhkan budaya Islami di lingkungan sekolah; 2) mampu mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk karakter peserta didik; 3) mampu pembelajaran yang jauh lebih kreatif; menyenangkan dan berkualitas; 4) mampu menumbuhkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah; 5) suasana sekolah yang ceria serta kondusif; 6) komunikasi yang menyenangkan dan efektif; 7) mengembangkan bakat dan minat, dikegiatan ekstrakurikuler; 8) mampu membangun budaya sehat, asri, ringkas, runut, resik rapih dan rawat; 9) mengintegrasikan kurikulum, metodologi, dan program yang berkesinambungan; 10) melaksanakan kerjasama dengan stakeholder.

Berdasarkan hasil wawancara kami tujuan utama humas Sekolah tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi dari sekolah tetapi masih dalam proses pencapaian. Jadi berdasarkan visi dan misi dengan hasil wawancara, tujuan utama humas dengan sekolah sudah sesuai dengan visi dan misi dari sekolah tersebut meskipun masih dalam proses pencapaian.

Berdasarkan teori Rahmad (2016: 124) terjalannya hubungan antara sekolah dan masyarakat memiliki tujuan salah satunya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi serta pelaksanaan program sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut, prosedur sekolah tersebut dalam menilai kinerja humas dapat dilihat langsung dari hal-hal yang dipublikasikan atau di *share* humas terkait

kegiatan dan program dari SDIT Ulul Albab Tarakan, kemudian juga komunikasi yang dilakukan humas mengenai cara komunikasi sekolah dengan orang tua, misalnya tanggapan-tanggapan serta sosialisasi mengenai program kerja dari sekolah. Jadi pada saat tujuan humas diterapkan terutama pada poin memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah, akan menilai kinerja humas dengan melihat hal-hal yang dipublikasikan atau di *share* humas terkait kegiatan dan program dari sekolah.

Berdasarkan teori T.Sianipar dalam Purwanto, menyatakan bahwa jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan adanya hubungan masyarakat dengan sekolah yaitu salah satunya adalah untuk mendapatkan bantuan sekolah dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut jika masyarakat dan sekolah telah sepakat mengadakan kegiatan maka dana dan fasilitas penunjangannya berasal dari sekolah. Jadi kegiatan hubungan masyarakat bertujuan untuk memperoleh bantuan dana dari sekolah dan di sekolah tersebut telah menerapkan tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah dalam *problem solving* yang dihadapi oleh masyarakat salah satunya dalam melakukan kegiatan menggunakan dana dari sekolah dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah dan juga melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah.

Berdasarkan teori T.Sianipar dalam Purwanto, salah satu tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah yaitu untuk memperoleh dukungan serta bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dari hasil wawancara kami di sekolah tersebut, sekolah mengadakan kegiatan selalu mendapat respon positif dari masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun orang tua siswa selalu memberikan respon positif, respon itu dapat berupa mendukung acara tersebut selain itu pihak masyarakat juga menyimpan kepercayaan serta kepedulian terhadap sekolah ini. Jadi tujuan hubungan masyarakat dan sekolah adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan sekolah tersebut telah mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa respon positif yang baik dan kepercayaan masyarakat kepada sekolah tersebut.

Berdasarkan teori Rahmad (2016 :124), adapun manfaat dari hubungan sekolah dengan

masyarakat yang diperoleh dari sekolah adalah a) sekolah dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidik maupun dari fasilitas pendidikan, b) sekolah dapat menyampaikan mengenai kesulitan-kesulitan yang sedang dialami sekolah yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikannya, c) sekolah dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pendidikan supaya terhindar dari kesalah pahaman antara sekolah dengan masyarakat, d) sekolah dapat menggunakan masyarakat sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut, manfaat dari kerjasama sekolah dan masyarakat yang dilakukan di sekolah yaitu masyarakat bisa menerima keadaan sekolah, proses kerjasama bisa berjalan dengan baik, kegiatan bisa terlaksanakan. Jadi adapun manfaat dari humas dengan sekolah sudah berjalan, salah satunya bisa menerima keadaan sekolah yaitu pada poin a) sekolah melaksanakan peningkatan kualitas guru.

Berdasarkan teori Menurut Rahmad (2016:124), dengan adanya humas dengan sekolah berjalan dengan baik akan memberi manfaat pada kedua pihak. Dari hasil wawancara kami di sekolah tersebut, timbal balik dari sekolah yaitu masyarakat berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain program-program di bulan Ramadhan, bersilaturahmi jika ada yang mengundang, lalu misalnya ada acara 17 Agustus jika Sekolah diberikan proposal maka sekolah akan memberikan bantuan dana. Jadi dari hubungan masyarakat dengan sekolah sudah terjalin dengan baik dan dalam melakukan program-program kerjasama yang ada sudah memberikan manfaat dan timbal balik bagi masyarakat dan juga sekolah tersebut.

Berdasarkan teori Seitel dalam Fadiah (2016: 16-17) humas memiliki fungsi tersendiri dalam sebuah organisasi, yaitu *publicity*: berkaitan dengan fungsi *marketing* yang mempublikasikan hal-hal positif mengenai klien atau karyawan melalui media tertentu dalam keterkaitan yang lebih erat. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah tersebut penyelenggaraan humas di sekolah yaitu setiap mengadakan kegiatan selalu dipublikasikan oleh humas agar sekolah diketahui oleh masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan yang dilakukan baik itu kegiatan rutin yang telah dilakukan setiap hari maupun kegiatan tahunan. Jadi, penyelenggaraan humas termasuk dalam fungsi

humas yang sesuai dengan *publicity*: berkaitan dengan fungsi *marketing* yang mempublikasikan hal-hal positif mengenai klien atau karyawan menggunakan media sosial.

Berdasarkan teori Seitel dalam Fadiyah (2016: 16-17) fungsi humas yaitu: a) menulis merupakan keahlian dari seorang humas dan merupakan ruang lingkup dari humas, b) seorang humas berkerjasama melakukan publisitas di media massa, c) merencanakan berbagai macam kegiatan, d) menyediakan sarana, e) humas meneliti sikap dan opini yang mempengaruhi perilaku dan kepercayaan masyarakat. Dari hasil wawancara kami di sekolah tersebut, guru yang ditunjuk sekolah sebagai humas sekolah memiliki kompetensi di bidang humas sekolah, antara lain dapat berkomunikasi dengan baik, mampu memberikan informasi yang jelas terkait program-program yang ada di sekolah, mempunyai kemampuan bekerja sama, mempunyai kemampuan dalam menggunakan media sosial, memiliki wawasan yang luas, serta berpenampilan yang rapi dan menarik. Jadi fungsi humas adalah memiliki keahlian dalam menulis, mampu bekerja sama, memiliki sikap yang santun dan baik. Humas di sekolah tersebut telah menunjuk waka humas sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, dan sudah sesuai dengan fungsi humas dengan sekolah.

Berdasarkan teori Qoimah (2018: 199) fungsi humas yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam usaha mengatasi berbagai persoalan pendidikan serta meningkatkan kerjasama humas dengan sekolah. Berdasarkan Hasil observasi kami di sekolah tersebut, perbedaan pendapat antara masyarakat dan juga sekolah dalam hal mencapai tujuan bersama berjalan dengan baik, sekolah membuka diri apabila ada masukan dari masyarakat dan apabila kalau ada sampai komplain atau keberatan dari masyarakat itu tidak ada. Jadi fungsi humas adalah untuk mengatasi persoalan hubungan masyarakat dengan sekolah untuk mencapai tujuan bersama dan di sekolah sudah berjalan dengan baik fungsi humas sehingga masyarakat tidak keberatan dan tidak ada yang komplain serta masyarakat menerima dengan baik.

Berdasarkan teori Rosady Ruslan dalam Cahyaningsih (2015:13) menjelaskan secara rinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut : 1) Sebagai komunikator antara organisasi dan lembaga yang diwakilinya; 2) Membina

hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif serta saling menguntungkan kedua belah pihak; 3) Peranan pendukung pariwisata, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi pariwisata organisasi; 4) Membentuk citra korporasi, artinya peranan humas berupaya untuk menciptakan citra yang baik bagi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan sekolah tersebut, peran humas sangat penting dalam aktivitas sekolah, dimana peran humas sebagai penyambung informasi di sekolah antara kepala sekolah dengan komite-dengan masyarakat. Peran humas di sekolah tersebut dalam meningkatkan kinerja sekolah yaitu membangun sistem kekeluargaan dan kebersamaan misalnya mengadakan rapat santai antara guru dengan wali peserta didik. SDIT Ulul Albab Tarakan telah menerapkan peran humas yang sesuai dengan salah satu peran humas yaitu sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi.

Menurut pendapat Indra Fachrudi dalam Yulitasari (tanpa tahun: 13-14) tentang beberapa teknik yang telah dilaksanakan di Indonesia, yaitu : a) *Group meeting* (pertemuan kelompok) yang meliputi temu fakta, diskusi, bekerja sambil bermain bersifat rekreasi yang berbentuk pertemuan keluarga; b) *Face to face* (pertemuan tatap muka) yang meliputi kunjungan ke rumah peserta didik dan penyampaian kepada wali peserta didik; c) *Observation and participation* (observasi dan partisipasi) yang meliputi orang tua sebagai observer, orang tua sebagai peserta dan ibu pembantu kelas; d) *The written word* (berucap di kertas) yang meliputi catatan berita gembira, berita dalam surat, buku kecil permulaan sekolah, dan pamphlet. Berdasarkan hasil wawancara kami di sekolah, teknik yang digunakan berawal dari program kerja sekolah misalnya program kerja sekolah yang sifatnya kemasyarakatan, jadi ada arah untuk humas sekolah mengaturnya contoh program yang sifatnya setahun sekali. Misalnya sekolah mengadakan rapat pertemuan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan wali peserta didik. Jadi, dari beberapa teknik yang ada bahwa sekolah ini sudah menerapkan salah satu teknik yaitu *Group meeting* (pertemuan kelompok). Sekolah ini mengadakan rapat membahas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut F. Rachmadi Cahyaningsih (2015:17) menjelaskan tentang media komunikasi yang digunakan oleh organisasi humas meliputi : 1) Media berita, 2) Media siaran 3) Media

komunikasi tatap muka. Berdasarkan hasil wawancara, media yang digunakan yaitu melalui media sosial. Jadi, media yang digunakan dengan sekolah sudah sesuai dengan 2 media yang ada, yaitu media siaran (broadcast media).

KESIMPULAN

Sekolah ini telah melakukan cara yang sesuai untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi yang nyata melalui media social, sehingga peran humas dengan sekolah yaitu menjaga hubungan baik. Manfaat dari bentuk kerjasama humas dengan sekolah sudah berjalan dengan baik serta bentuk atau teknik dalam pelaksanaan program kerja dari humas berkesinambungan.

Tujuan hubungan masyarakat dan sekolah adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan sekolah tersebut telah mendapatkan dukungan dari masyarakat berupa respon positif yang baik dan kepercayaan dari masyarakat. Bentuk penyelenggaraan humas merupakan fungsi dari humas dengan sekolah yaitu untuk mengatasi persoalan hubungan masyarakat dengan sekolah sehingga tercapai tujuan bersama dan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik fungsi humas sehingga masyarakat tidak keberatan dan tidak ada yang complain serta masyarakat menerima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Cahyaningsih, Estih. 2015. *Peran Humas Dalam Rangka Membangun Citra Dan Mempromosikan Smk Pgri 1 Sentolo Kulon Progo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi (Online)

Fadiyah, Rozanah Ahlam. 2016. *Peran Humas Dalam Membangun Citra Positif Sekolah Di Sd N Sosrowijayan Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi (Online)
Imaniyah, Rizky dkk.2016. *Pengelolaan Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Home-Schooling*. Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Vol. 1 No. 1
Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Purwanto, Ngalm. 2012. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Qoimah. 2018. *Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 1 No. 2
Rahmad, Abdul. 2016. *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi
Ratri, Safitri. 2009. *Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Pakualaman Yogyakarta*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian (Online)
Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
Yulitasari, Effa. 2015. *Pelaksanaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat di Sekolah Berbasis Pesantren (Studi Kasus Di SMP Ar-Rohmah Putri Malang)*. Malang: Universitas Negeri Malang. Skripsi (Online)
PP Nomor 39 Tahun 1992 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

KAJIAN IMPLIKASI NEOLIBERAL PADA TENAGA PENDIDIK PERGURUAN TINGGI DALAM KONTEKS PERGESERAN PERAN: SEBUAH PERSPEKTIF EKONOMI

STUDY OF THE NEOLIBERAL IMPLICATIONS OF HIGHER EDUCATION EDUCATORS IN THE CONTEXT OF SHIFTING ROLES: AN ECONOMIC PERSPEKTIVE

Yusuf Permana¹, Bhimo Rizky Samudro², Yogi Pasca Pratama³, Agus Tri Darmawanto⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sebelas Maret

⁴ Fakultas Ekonomi

Universitas Borneo Tarakan

Email: yusufpermana19061996@gmail.com¹, bhimosamudro@gmail.com²,
yogipasca@gmail.com³, tridrm7@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai kritik untuk pendidikan tinggi di Indonesia khususnya berfokus pada tenaga pendidik yang memiliki pola pikir yang pragmatis pada saat ini. Tenaga pendidik kemudian lalai dalam tugasnya dan meninggalkan hakikatnya sehingga menimbulkan berbagai dampak yang merubah pola perilakunya. Hal ini dilihat dari kaca mata ekonomi yaitu dengan peristiwa “trade off” yang memiliki arti bahwa dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk memperoleh sesuatu yang lain.. Penelitian ini dikaji dengan metode deskriptif yang sifatnya memaparkan dengan pendekatan analisis ini atau “content analysis” yang mendalami suatu informasi-informasi terkini mengenai Pendidikan tinggi. Kemudian dikaitkan dengan prinsip ekonomi politik CCC “Circular and Cumulative Causation”. Sebagai hasil adalah, memang benar adanya peristiwa trade off tersebut hal ini dibuktikan dengan aktifnya seorang tenaga pendidik untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah agar dianggap produktif dan mendapatkan remunerasi dan jabatan. Dan akhirnya terjadi pergeseran peran dan fungsi seorang tenaga pendidik.

Kata Kunci: *Trade Off; Ccc; Tenaga Pendidik; Pendidikan Tinggi*

ABSTRACT

The aim of this study is to criticize higher education in Indonesia, especially focusing on educators who have a pragmatic mindset at this time. The educator then forgets about the task and leaves the essence so that it causes various effects of the behavior pattern. This is made from an economic perspective, namely a “tradeoff” event that means that a sacrifice is needed to get something else. The study was examined by descriptive method which describes the analytical approach or “content analysis” that explores the latest information on higher education. Then linked to the principle of CCC political economy “Circular and Cumulative Causation”. As a result, it is true that there is a trade off event, this is evidenced by the active involvement of an educator to conduct scientific research and publications so that they are considered productive and receive remuneration and position. And finally there is a shift in the role and function of an educator.

Keyword: *Trade Off; Ccc; Educator; Higher Education*

PENDAHULUAN

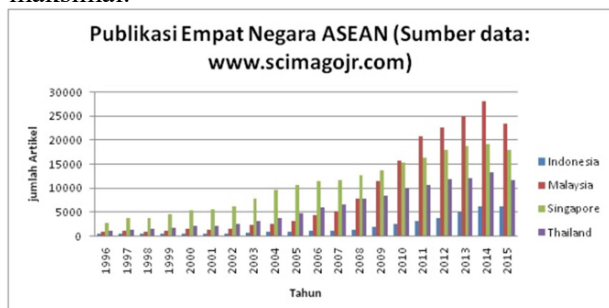
Menyoroti secara langsung pendidikan di perguruan tinggi Indonesia, terutama perguruan tinggi yang notabenehnya adalah negeri, dalam proses kegiatan pembelajarannya baik tenaga pendidik maupun peserta didik dituntut aktif dalam

proses pembelajaran. Namun, dewasa ini banyak sekali tampak di depan mata mahasiswa hanya duduk di depan ruang kelas menunggu kehadiran seorang tenaga pendidik yang tidak kunjung datang.

Pada hakikatnya, kewajiban seorang tenaga pendidik adalah mengajarkan dengan sebaik-baiknya agar pengetahuan yang dimilikinya tersampaikan dengan sebagaimana mestinya sehingga dapat mencerdaskan para peserta didiknya. Kewajiban inilah yang seharusnya dipegang teguh oleh para tenaga pendidik.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9, mengatur dan menjelaskan tentang “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang meliputi : (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian. Dengan didasari Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama poin kedua dan ketiga, sebagai bentuk keluarannya tenaga pendidik diwajibkan mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk, karya tulis ilmiah salah satunya berupa jurnal. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah pasti sangat menyita waktu dari tenaga pendidik, sehingga kemudian mengurangi frekuensi waktu mengajar dan sangat menguras tenaga tenaga pendidik pula.

Disini terjadi *Trade Off* bagi tenaga pendidik, antara memilih meluangkan waktu untuk proses kegiatan pembelajaran dengan waktu untuk melaksanakan penelitian atau seminar. Dampaknya terjadi hal yang dilematis karena ketika memilih untuk memaksimalkan proses pembelajaran, tenaga pendidik melalaikan Tri dharma Perguruan Tinggi. Sebaliknya jika memilih mempergunakan waktu untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka tidak akan maksimal waktu pembelajarannya, hal ini merupakan hal yang mutlak. Sedangkan jika memilih menjalankan keduanya secara bersamaan dua hal yang menjadi dilema tersebut sama-sama tidak akan berjalan maksimal.



Gambar 1. Publikasi Empat Negara Asean

Peristiwa yang dilematis ini yang menuntun kearah perubahan pemikiran atau pola pikir yang spesifik dalam aspek psikologis. Bukan hanya dilematis, tetapi hal ini menjadi dogmatis dan

pragmatis sekali. Sudah jelas, jika memilih meluangkan waktu untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disinilah kesan pragmatis muncul karena tenaga pendidik justru terkesan egois dan mengedepankan kepentingan pribadi. Menjadi dogmatis kemudian karena tenaga pendidik yang banyak melakukan penelitian dan juga seminar segingga dianggap produktif, berbeda dengan yang merelakan waktu untuk mengajar yang dianggap stagnan atau tidak produktif. Pasalnya dengan pilihan tersebut para peserta didik adalah pihak yang dirugikan. Bukankah sudah jelas hal tersebut merupakan sebuah pergeseran peran atau fungsi daripada pendidik mengingat hakikat tenaga pendidik tersebut diatas. Kemudian untuk tujuan ataupun maksud dari tulisan ini adalah sebagai kritik terhadap Pendidikan yang berlaku saat ini dan juga untuk mengetahui trade off yang terjadi pada tenaga pendidik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diapaparkan sebelumnya, berkaitan dengan perilaku *trade off* tenaga pendidik mempunyai dampak yang penting baik itu positif maupun negatif. Mengingat begitu dilematisnya proses pengambilan keputusan bagi seorang tenaga pendidik, tetapi proses inilah yang menentukan nasib pendidikan peserta didik. Meskipun dalam realitanya hakikat tenaga pendidik adalah mencerdaskan para peserta didik, namun dalam prakteknya masih terjadi suatu hal yang kontradiksi. Hal ini karena masalah *trade off* ini sebenarnya terkait dengan berbagai lingkup yang saling berkaitan. Sehingga masih diperlukan kajian tentang *trade off* tenaga pendidik dan berbagai aspek yang melingkupinya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pertanyaan penelitian yang ditemukan dalam hal ini tidak lain, apakah terjadi *trade off* tenaga pendidik akibat dari tri dharma Pendidikan yang berfokus pada tuntutan tenaga pendidik untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, kemudian bagaimana implikasi kegiatan publikasi ilmiah tenaga pendidik terhadap hakikatnya sebagai tenaga pendidik dan pergeseran peran dan fungsinya sebagai pendidik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Nazir (1988) menjelaskan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2005) menegaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Data primer, data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, dan kuisioner, berikutnya adalah data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang telah ada seperti pada majalah, surat kabar, dan internet mengenai masalah yang relevan

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah observasi, wawancara (*interview*) dan didukung oleh data sekunder yang berupa visualisasi yang diperoleh dari media elektronik maupun institusi-institusi tertentu terkait dengan kajian penelitian.

Pola suatu keadaan yang telah terbentuk dikonfirmasi kepada institusi/informan/stakeholder terkait dengan menggunakan prinsip etis penelitian. Etika penelitian berhubungan dengan interaksi antara peneliti dan orang-orang yang diteliti. Etika profesional berkaitan dengan isu-isu tambahan seperti hubungan kolaboratif antara peneliti, hubungan mentoring, kekayaan intelektual, fabrikasi data, dan plagiarisme (Pratama, 2018).

Kemudian untuk Teknik analisis data penulis menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi.

Bungin (2001) menjelaskan bahwa Analisis isi merupakan metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikan, dan relevansinya.

Suprayogo (2003) menegaskan bahwa Analisis isi memiliki tujuan utama menjelaskan karakteristik dari pesan-pesan yang termuat dalam teks-teks umum dan bermedia. Selain itu adalah teknik sistematis untuk menganalisis pesan dan mengolah pesan, adalah suatu alat mengobservasi dan menganalisis perilaku

komunikasi yang terbuka dan komunikator yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang diterapkan yaitu dengan menggunakan Teknik konten analisis yang mengkaji informasi-informasi terkini, Sebenarnya investasi sumber daya manusia bertujuan jangka Panjang yakni kualitas tenaga kerja yang memiliki mutu dan kualitas yang bias bersaing. Harapannya dengan begitu akan mendongkrak perekonomian suatu negara. Jalan yang ditempuh dalam menuju kualitas dan mutu yang baik dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan, sehingga terjadi perubahan orientasi yang semula Pendidikan memiliki orientasi melayani sekarang bergeser ke orientasi profit yang mengedepankan keuntungan semata. Dengan dalil meningkatkan mutu Pendidikan kemudian muncul kebijakan tri dharma Pendidikan yang berfokus pada penelitian tenaga pendidik. Jelas, hal yang demikian bisa dikaitkan dengan *Circular Cumulative Causation* karena kebijakan dari suatu Lembaga disini diindikasi mempengaruhi Lembaga lainnya. Hasilnya terjadi *trade off* yang kemudian memunculkan persaingan diantara tenaga pendidik. Kemudian melupakan hakikatnya sebagai pendidik karena mementingkan penelitian dan seminar semata agar dinilai produktif. Inilah yang dimaksud penulis sebagai pergeseran peran pendidik. Kemudian terjadi anomali kebijakan yang semula bertujuan baik, dan malah sebaliknya atau bias kita artikan kontradiktif.

KESIMPULAN

Pertama, yaitu bahwa terjadi *trade off* tenaga pendidik akibat dari tri dharma Pendidikan yang berfokus pada penelitian dan publikasi ilmiah, karena kecenderungannya tenaga pendidik lebih banyak kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar daripada mengajar didalam kelas. Hal ini jelas sebuah peristiwa *trade off* karena seorang tenaga pendidik memilih mengorbankan waktu dan hakikatnya sebagai pendidik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

Kedua, implikasi bahwa kegiatan publikasi ilmiah terhadap hakikatnya sebagai seorang pendidik, ialah terjadi pergeseran pada pola perilaku tenaga pendidik yang semula mengemban tugas mulia menjadi tenaga yang harus berkompetisi dengan publikasi ilmiah

demi tujuan individualisnya yang tidak lain agar dianggap produktif karena memiliki banyak penelitian dan seminar, yang kemudian mempengaruhi jabatannya. Secara langsung hal ini sangat mempengaruhi sistem Pendidikan yang berlaku terutama pada orientasinya. Inilah yang dimaksudkan dengan pergeseran dan fungsi dari seorang tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hal. 147
- Barahamin, Andre. 2015. Kegagalan Kritik terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia. (online), (<http://www.indoprogress.com/2015/01/kegagalan-kritik-terhadap-Pendidikan-tinggi-di-Indonesia>, diakses 17 Oktober 2017)
- Harian Detik.com. 2017. Dosen Ini Raih Travel Grant di Konferensi Penelitian Media. (online), (<http://m.detik.com/news/berita/d-3567177/dosen-ini-raih-travel-grant-di-konferensi-penelitian-media>, diakses 17 Oktober 2017)
- Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal 113
- Musyaddad, Kholid. 2013. Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Journal Edu-Bio*; Vol. 4
- Mankiw, N. Gregory; Quah, E.; Wilson P. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat
- Munirah. 2015. Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita. *Jurnal Auladuna*, Vol. 2 No. 2 Desember 2015: 233-245
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- O'hara, Philip Anthony. 2008. Principal of Circular and Cumulative Causation: Fusing Myrdalian and Kaldorian Growth an Development Dynamics. *Journal of Economic issues*, Vol. XLII No.2 pp375-387
- Panuluh, Ladang Rampak. 2012. *Menyongsong Indonesia*. (online), (<https://www.caknun.com/2012/menyongsong-indonesia/> , diakses 18 Oktober 2017)
- Pratama, Yogi Pasca. 2018. Penelitian Kualitatif: Modul Metode Pengumpulan Data. Riau: CV. Draft Media
- Republik Indonesia. 2012. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5336. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

**PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI OPERASI HITUNG CAMPURAN
MENGUNAKAN MODEL *THINK PAIR SHARE* SISWA KELAS VI-A SDN UTAMA 2 TARAKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

***IMPROVED MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES MIXED COUNTING SURGICAL
MATERIALS USING THINK PAIR MODEL SHARE CLASS VI-A STUDENTS
SDN UTAMA 2 TARAKAN YEAR LESSON 2018/2019***

Adhe Zahrotul Ummami¹

SDN Utama 2 Tarakan

Email: kokoro.zee@gmail.com¹

ABSTRAK

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI-A semester I SDN Utama 2 Tarakan yang berjumlah 34 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 bulan mulai bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 kali siklus pembelajaran yang masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yakni, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, test, dan dokumentasi. Data dianalisis secara statistik menggunakan rumus persentase. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika materi operasi hitung campuran pada siswa kelas VI-A SDN Utama 2 Tarakan tahun pelajaran 2018/2019. Terbukti pada nilai ulangan harian pratindakan terdapat 10 siswa atau 29,41% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata 61,88. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas ada 23 siswa atau 67,65% dengan nilai rata-rata kelas 78,29. Pada siklus II siswa yang tuntas dengan nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 90,47 dengan ketuntasan 91,18%. Nilai yang diperoleh pada siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal yang diharapkan telah tercapai yaitu 85% siswa yang tuntas belajar.

Kata Kunci: Model Pembelajaran *Think Pair and Share*; Hasil Belajar

ABSTRACT

The subjects in this study were students of class VI-A in the first semester of SDN Utama 2 Tarakan which numbered 34 students, consisting of 16 male students and 18 female students. This research was conducted in 3 months starting in July 2018 until September 2018. This classroom action research consisted of 2 learning cycles, each of which consisted of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. Data collection methods used are observation, test, and documentation. Data were analyzed statistically using the percentage formula. The findings of this study indicate that through the cooperative learning model Think Pair Share (TPS) can improve Mathematics learning outcomes mixed counting operating material on students of class VI-A SDN Utama 2 Tarakan academic year 2018/2019. It is evident in the pre-action daily test scores that there are 10 students or 29.41% of students who complete the study with an average score of 61.88. In the first cycle the number of students who completed there were 23 students or 67.65% with a class average value of 78.29. In cycle II students who complete with an average grade value increase to 90.47 with completeness 91.18%. The value obtained in the second cycle shows that the expected classical completeness has been achieved, 85% of students who complete learning.

Keyword: *Think Pair and Share Learning Model; Learning Outcomes*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Nasional harus ada usaha sadar untuk menyiapkan

siswa melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Oleh

karena itu inovasi dibidang pendidikan sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu pelajaran matematika.

Belajar matematika ini sangat penting, tapi meskipun penting, matematika dianggap sebagian besar siswa sebagai mata pelajaran yang sulit, membosankan, tidak praktis, abstrak, dan dalam pembelajaran membutuhkan kemampuan khusus yang tidak selalu dalam jangkauan setiap orang.

Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka guru memilih model pembelajaran yang tepat, guru memilih atau menggunakan strategi dengan pendekatan, metode dan tehnik yang sesuai dengan materi yang melibatkan siswa untuk aktif dan termotivasi dalam belajar, baik secara mental, fisik maupun sosial, sehingga kemahiran dalam menguasai materi dapat dioptimalisasikan. Belajar matematika juga harus bermakna sehingga siswa tidak mengalami kesulitan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi matematika siswa kelas VI-A pada sub pokok bahasan operasi hitung campuran masih rendah, 24 siswa dari 34 siswa atau 70,59% belum mencapai nilai standar ketuntasan belajar. Penyebabnya ada dua kemungkinan yaitu kurangnya ketelitian dalam mengerjakan soal atau kurangnya pemahaman konsep yang dikuasai siswa. Kenyataannya pembelajaran matematika setiap ulangan harian masih rendah khususnya pada materi operasi hitung campuran masih rendah yaitu pada ulangan pretes nilai rata-rata 61,88, sehingga pencapaian target nilai KKM mata pelajaran matematika masih dibawah KKM, rata-rata siswa kurang memahami cara menghitung dua bilangan seperti penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian dan pembagian, apalagi pada perhitungan campuran tiga bilangan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang konsep matematika, tentunya banyak hal yang dapat dilakukan sehingga siswa termotivasi dan menyenangi pelajaran matematika. Agar siswa tertarik terhadap pelajaran matematika, maka perlu suasana senang dan nyaman dalam belajar dengan menerapkan strategi atau model pembelajaran yang cocok untuk siswa dalam berperan aktif bagi mutu dan kualitas pendidikan secara optimal guna mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jika perhatian siswa sudah terfokus dalam pembelajaran, maka siswa cukup kuat dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan, dan hasil belajar yang dihasilkan siswa akan lebih baik.

Model pembelajaran TPS adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk menjawab suatu pertanyaan. Dalam model pembelajaran TPS guru mengajukan suatu pertanyaan, siswa memikirkan jawaban dalam beberapa saat, kemudian mereka berdiskusi dengan pasangan dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Pelaksanaan model pembelajaran TPS menjadikan siswa tidak hanya aktif mendengar dan melihat permainan.

SDN Utama 2 Tarakan menjadi obyek yang diteliti mempunyai komitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa melalui proses pembelajaran aktif. Uraian ini menunjukkan bahwa matematika berkenaan dengan struktur dan hubungan yang berdasarkan konsep-konsep yang abstrak sehingga diperlukan simbol-simbol untuk menyampaikannya (Sam's, 2010: 12).

Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang lebih dari satu operasi dalam suatu bilangan tersebut (Mulyana, 2007: 31). Dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, terdapat dua hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu: a) tanda operasi hitung, dan b) tanda kurung.

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Artinya pembelajaran kooperatif merupakan sistem belajar kelompok terstruktur dengan unsur unsur sebagai berikut: (1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab individual, (3) interaksi personal/tatap muka, (4) komunikasi antar anggota, dan (5) penilaian proses kelompok (Tampubolon, 2014: 90).

Dari berbagai tipe pembelajaran kooperatif yang ada, peneliti memilih pembelajaran kooperatif tipe *think pair share* (TPS). Tipe ini merupakan pembelajaran kooperatif yang berorientasi pada teori belajar konstruktivistik. Pada model ini siswa dituntut untuk menemukan atau membangun konsepnya sendiri terlebih dahulu (tahap *think*). Baru kemudian mereka diberi waktu untuk diskusi berpasangan dengan teman sebangkunya (tahap *pair*) dan dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok (tahap *share*).

Alma (2009: 91) mengemukakan bahwa model *Think Pair Share* merupakan teknik sederhana yang mempunyai keuntungan dapat mengoptimalkan partisipasi siswa mengeluarkan pendapat, dan meningkatkan pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Model tindakan yang digunakan menggunakan model Kemmis dan Mc. Tanggart, yaitu model spiral (dalam Wiraatmaja, 2006:66), model ini terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi. Setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan. empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (Arikunto, dkk, 2010: 16).

Tempat dilaksanakan di SDN Utama 2 Tarakan ini, pada siswa kelas VI-A dengan mata pelajaran matematika materi operasi hitung campuran bilangan bulat semester I tahun pelajaran 2018/2019. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018 dan waktunya disesuaikan dengan jadwal mengajar guru kelas sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Subjek penelitian adalah kelas VI-A semester I di SDN Utama 2 Tarakan tahun pelajaran 2018/2019. Jumlah siswa kelas VI-A pada tahun pelajaran 2018/2019, adalah 34 orang siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.

Untuk membantu pengamatan maka peneliti dibantu dengan seorang pengamat yang bertindak sebagai observer dari penelitian ini adalah guru dari kelas VI lainnya di SDN Utama 2 Tarakan yakni Nugraha Ardi Syahputra, S. Pd.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) observasi, 2) tes, dan 3) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif. Penilaian ketuntasan belajar menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{B}{N} \times 100$$

Keterangan:

B = banyaknya butir yang dijawab benar
N = banyaknya butir soal

Pengamatan aktivitas siswa dianalisis menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$P = \frac{A}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase keaktifan siswa
A = Jumlah skor yang dicapai
N = Jumlah skor maksimal

Kriteria presentase aktivitas siswa sebagai berikut (Hobri, 2007: 82):

$p \geq 80$	Sangat aktif
$70 \leq p < 80$	Aktif
$60 \leq p < 70$	Cukup aktif
$p < 60$	Tidak aktif

Analisis pengamatan aktivitas guru diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, mulai guru membuka pelajaran sampai guru menutup pelajaran. Penilaian pengamatan aktivitas guru akan dilakukan oleh pengamat berdasarkan empat kategori skala penilaian yaitu:

- 1 = dilaksanakan tetapi tidak selesai dan tidak sistematis. (tidak baik)
- 2 = dilaksanakan, selesai tetapi tidak sistematis. (kurang baik)
- 3 = dilaksanakan, selesai tetapi kurang sistematis. (cukup baik)
- 4 = dilaksanakan, selesai, dan sistematis. (baik) (Trianto, 2011:367)

Analisis hasil pengamatan aktivitas guru dilakukan menggunakan skor rata-rata dari hasil penilaian para pengamat pada setiap kegiatan. Kriteria penilaian aktivitas guru sebagai berikut:

1,00 – 1,99	= Kurang baik
2,00 – 2,99	= Cukup Baik
2,99 – 3,50	= Baik
3,50 – 4,00	= Sangat baik

Siklus 1 dilaksanakan pada semester I, pertemuan 1 pada hari Kamis, 02 Agustus 2018, pertemuan 2 pada hari Kamis, 07 Agustus 2018, dan pertemuan 3 pada hari Selasa, 14 Agustus 2018 selama 2 jam pelajaran (07.15 – 08.25).

Pelaksanaan siklus II yaitu pertemuan 4 pada hari Kamis, 23 Agustus 2018, pertemuan 5 pada hari Selasa, 28 Agustus 2018, dan pertemuan 6 pada hari Selasa, 4 September 2018 selama 2 jam pelajaran (07.15 – 08.25).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran *think pair share* maka diberikan tes pembelajaran dengan metode yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan awal

siswa. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran pratindakan sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Pratindakan

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
10	29.41	TUNTAS
24	70.59	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel tersebut menunjukkan hanya 10 siswa atau 29,41% siswa yang tuntas dan sebanyak 24 siswa atau 70,59% siswa belum tuntas belajarnya dalam memahami materi hitung campur bilangan bulat. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus I Pertemuan 1

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
12	35.29	TUNTAS
22	64.71	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 2 menunjukkan sebanyak 12 siswa atau 35,29% siswa yang tuntas dan 22 siswa atau 64,71% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus 1 pertemuan 1. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus 1 pertemuan 2 sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus I Pertemuan 2

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
15	44.12	TUNTAS
19	55.88	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 3 menunjukkan sebanyak 15 siswa atau 44,12% siswa yang tuntas dan sebanyak 19 siswa atau 55,88% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus 1 pertemuan 2. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus 1 pertemuan 3 sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus I Pertemuan 3

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
23	67.65	TUNTAS
11	32.35	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 4 menunjukkan peningkatan di mana sebanyak 23 siswa atau 67,65% siswa yang

tuntas dan 11 siswa atau 32,35% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus 1 pertemuan 3.

Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus II pertemuan 4 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus II Pertemuan 4

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
25	73.53	TUNTAS
9	26.47	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 5 menunjukkan peningkatan lagi yang mana sebanyak 25 siswa atau 73,53% siswa yang tuntas dan tinggal 9 siswa atau 26,47% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus II pertemuan 4. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus II pertemuan 5 sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus II Pertemuan 5

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
26	76.47	TUNTAS
8	23.53	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 6 menunjukkan peningkatan yang mana sebanyak 26 siswa atau 76,47% siswa yang tuntas dan 8 siswa atau 23,53% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus II pertemuan 5. Banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran siklus II pertemuan 6 sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Nilai Ketuntasan Siswa Siklus II Pertemuan 6

BANYAK	PERSENTASE (%)	KRITERIA
31	91.18	TUNTAS
3	8.82	TIDAK TUNTAS

Data pada tabel 7 menunjukkan peningkatan yang mana sebanyak 31 siswa atau 91,18% siswa yang tuntas dan hanya 3 siswa atau 8,82% siswa belum tuntas belajarnya pada siklus II pertemuan 6. Memperhatikan hasil penelitian hingga siklus II pertemuan 6 dengan telah tercapainya ketuntasan minimal klasikal lebih besar dari 80% dan rata-rata nilai melebihi 70 maka penelitian dihentikan. Adapun hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 dan 2

SIKLUS	PERTEMUAN KE-	RATA-RATA	KRITERIA
1	1	74.51	Aktif
	2	76.14	Aktif
	3	78.1	Aktif
2	4	79.08	Aktif
	5	79.74	Aktif
	6	80.07	Sangat Aktif

Dari tabel 8 di atas dapat dianalisis bahwa aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 1 diperoleh rata-rata 74,51 termasuk dalam kriteria aktif. Aktivitas siswa siklus 1 pertemuan 2 diperoleh rata-rata 76,14 masuk dalam kriteria aktif. Aktivitas siswa siklus 1 pertemuan 3 diperoleh rata-rata 78,10 masuk dalam kriteria aktif. Aktivitas siswa siklus 2 pertemuan 4 diperoleh rata-rata 79,08 masuk dalam kriteria aktif. Aktivitas siswa siklus 2 pertemuan 5 diperoleh rata-rata 79,74 masuk dalam kriteria aktif. Dan aktivitas siswa siklus 2 pertemuan 6 diperoleh rata-rata 80,07 masuk dalam kriteria sangat aktif.

Untuk hasil pengamatan aktivitas guru siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus 1 dan 2

SIKLUS	PERTEMUAN KE-	RATA-RATA	KRITERIA
1	1	3.42	Baik
	2	3.5	Baik
	3	3.58	Sangat Baik
2	4	3.67	Sangat Baik
	5	3.75	Sangat Baik
	6	3.79	Sangat Baik

Dari tabel 9 di atas dapat dianalisis bahwa aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan 1 diperoleh rata-rata 3,42 termasuk dalam kriteria baik. Aktivitas guru siklus 1 pertemuan 2 diperoleh rata-rata 3,50 masuk dalam kriteria baik. Aktivitas guru siklus 1 pertemuan 3 diperoleh rata-rata 3,58 masuk dalam kriteria sangat baik. Aktivitas guru siklus 2 pertemuan 4 diperoleh rata-rata 3,67 masuk dalam kriteria sangat baik. Aktivitas guru siklus 2 pertemuan 5 diperoleh rata-rata 3,75 masuk dalam kriteria sangat baik. Dan aktivitas guru siklus 2 pertemuan 6 diperoleh rata-rata 3,79 masuk dalam kriteria sangat baik.

KESIMPULAN

Dilihat dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan melalui beberapa rangkaian tindakan dimulai dari sebelum siklus, siklus I, dan siklus II serta berdasarkan analisis pembahasan dan data hasil belajar yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif *Think Pair Share* (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI-A SD Negeri Utama 2 Tarakan mata pelajaran matematika materi hitung campuran. Indikator tersebut dapat terlihat dari nilai posttest siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I terdapat 23 siswa atau 67,65% siswa yang tuntas dalam belajar dan dengan nilai rata-rata kelas 78,29 dan meningkat pada siklus II siswa yang tuntas mencapai 31 orang atau 91,18% dengan nilai rata-rata kelas 90,47 dan ada 3 siswa yang belum tuntas. Dengan demikian penelitian dihentikan karena indikator keberhasilan penelitian telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2000. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta
- Alma, Buchari. 2009. Model-Model Pembelajaran. Bandung: CV. Alfabeta
- Amri, S. dan Ahmadi K. I. 2010. Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Kelas. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Anonim. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, dkk. 2010. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Bumi Aksara
- Aqib, Zainal, dkk. 2011. Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru SD, SLB, dan TK. Bandung: Yusma Widya
- Barkley, Elizabert E, dkk. 2012. Collaborative Learning Techniques; Tehnik-tehnik Pembelajaran Kolaboratif. Bandung: Nusa Media
- Daryanto. 2011. Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah. Yogyakarta: Gava Media
- Depdiknas. 2006. Standar Isi. Jakarta: Depdiknas
- Djamarah. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta
- Faturrohman, Muhammad. 2012. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: PT. Refika Aditama

- Hamdani. (2011). Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Herman. 2010. Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hobri, H. 2007. *Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru dan Praktisi*. Jember: UPTD Balai Pengembangan Pendidikan (BPP)
- Igak, Wardhani dan Kuswaya Yunus. 2014. Penelitian Tindakan Kelas. Tangerang: Universitas Terbuka
- Indriyastuti. 2018. Dunia Matematika 6. Solo: PT. Tiga Serangkai
- Ismunanto, dkk. 2011. Ensiklopedia Matematika. Jakarta: Lentera Abadi
- Jaurhan, Muhammad. 2011. Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Lie, Anita. 2005. Cooperative Learning. Jakarta: Gramedia Widayarsana
- Marsigit. (2008). Hakikat Matematika Sekolah dan Siswa Senang Belajar Matematika?. Diakses dari <http://marsigitpsiko.blogspot.com/2008/12/hakekat-matematika-sekolahdan-siswa.html>. Pada tanggal, 13 Juni 2018, Jam 11.00 WIB
- Marwiyanto, dkk. 2008. Matematika Untuk SD dan MI. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama
- Mulyana, Deddy. 2007. Pengantar Matematika Dasar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2011. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustakim, Burhan. 2008. Konsep Matematika. Semarang: Pustaka Pelajar
- Narwanti, Sri. 2012. Penelitian Kualitatif. Surakarta: Yuma Pustaka
- Prihandoko, Antonius Cahya. 2006. Memahami Konsep Matematika Secara Benar dan Menarik. Jakarta: Erlangga
- Ratnawulan, Elis, dan H A Rusdiana. 2015. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saminanto. 2013. Mengembangkan RPP PAIKEM Scientific Kurikulum 2013. Semarang: Rasail
- Sam's, Rosma Hartiny. 2010. Model Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Teras
- Slameto. 1988. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta
- Slavin, Robert E. 2008. Cooperative Learning: Teori dan Riset. Bandung: Nusa Media
- Solihatini, Etin dan Raharjo. 2009. Cooperative Learning. Jakarta: Bumi Aksara
- Sriyanti, Lilik. 2011. Psikologi Belajar. Salatiga: STAIN Salatiga Press
- Subarinah, Sri. 2006. Inovasi Pembelajaran Matematika SD. Jakarta : Depdiknas
- Sudjana, Nana. (2005). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Bandung: Sinar Baru Algebsindo
- Suherman, Erman, et. all. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suyadi. 2010. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. Jogjakarta: Diva Press
- Syaefudin, Sa'ud, Udin dan Abin Syamsuddin Makmun. 2011. Perencanaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Syah, Muhibbin. 2004. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tampubolon, Saur M. 2014. Penelitian Tindakan Kelas; Untuk Pengembangan Profesi Pendidik dan Keilmuan. Jakarta: Erlangga
- Tim BSNP. 2006. Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI. Jakarta: BP Dharma Bhakti
- Tirtarahardja, Umar. 2008. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Trianto. 2010. Panduan Lengkap Penelitian dan Tindakan Kelas, Surabaya: Prestasi Pustaka
- Ufituhfiah. 2013. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share. <https://ufitahir.wordpress.com>. Diakses tanggal 22 Desember 2018 jam 13.06
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyuni, Sri. 2018. Zamrud Tema 1 Kelas 6. Surakarta: Putra Nugraha
- Wiraatmaja, Rochayati. 2006. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Yonny, Acep, dkk. 2010. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Familia

MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERKEADILAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA

THE MODEL RIGHT PROTECTION OF HEALTH SERVICES JUSTICE OF INDIGENOUS PEOPLE IN THE REGION OF NORTH KALIMANTAN BORDER

Marthen B Salinding¹, Basri²
Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan
Email: mhukum@ymail.com¹

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, karena itu pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebut dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. Kawasan perbatasan Kalimantan Utara dihuni oleh sebagian besar kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan akses pelayanan kesehatan yang masih rendah. Pemerataan sarana kesehatan ke kawasan perbatasan Provinsi Kaltara sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat dan untuk mengurangi *gap* yang tinggi dengan negara tetangga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan analisis kualitatif. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi kepada pemerintah agar membuat model perlindungan pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat diperbatasan sebagai komunitas yang terpencil melalui regulasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khusus adalah menyediakan bukti dasar yang dapat digunakan untuk merancang aksi/tindakan yang mengarah pada perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah perbatasan di bidang kesehatan dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi khusus untuk pengembangan program dan intervensi yang relevan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk Pemerintahan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak; Pelayanan Kesehatan; Masyarakat Hukum Adat; Perbatasan

ABSTRACT

Health is the right of every citizen, therefore the government is obliged to fulfill these rights by providing health facilities and infrastructure as well as human resources. The North Kalimantan border area is inhabited by a large proportion of the Indigenous Peoples unit with access to health services that are still low. Equitable distribution of health facilities to the border area of North Kalimantan Province is very necessary to improve the welfare of the Indigenous Peoples and to reduce the high gap with neighboring countries. The research method used is a normative legal research method, with qualitative analysis. The long-term goal of this research is as a source of information to the government in order to create a model for the protection of health services for the Indigenous Peoples on the border as a remote community through regulation of both the central government and regional governments. Whereas the specific objective is to provide basic evidence that can be used to design actions / actions that lead to the protection of the rights of Indigenous Peoples in the border region in the health sector and produce specific recommendations for program development and relevant interventions for stakeholders, including Governments.

Keyword: Protection; Rights; Health Services; Indigenous People; Border

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki aturan sendiri, pemimpin sendiri

dan harta bersama. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Masyarakat hukum adat tidak

dibentuk oleh penguasa melainkan tumbuh secara alamiah.

Salah satu hak konstitusional MHA adalah hak kesehatan. Sebagai hak konstitusional, maka negara memiliki kewajiban konstitusional pula memenuhi hak konstitusional setiap warga negara termasuk MHA. Eksistensi dan kedudukan MHA itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-konstitusional dan hak tradisional. Salah satu hak yang sangat mendasar bagi MHA di wilayah perbatasan Kalimantan Utara adalah hak pelayanan kesehatan. (Wicipto Setiadi, Mei 2011).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan bagi rakyat Indonesia merupakan hak konstitusional memerlukan pengaturan pemenuhan dari negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan kepada setiap warga negara termasuk MHA sebagai komunitas. Kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dilepaskan dari kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang prima akan menciptakan SDM yang unggul.

Terkait pengertian kesehatan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Dengan demikian manusia yang sehat adalah manusia yang seluruh aspek kemanusiannya sehat. Akan tetapi hingga saat ini kondisi pelayanan kesehatan MHA di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara belum maksimal seperti halnya masyarakat perkotaan.

Terdapat beberapa permasalahan pemenuhan hak kesehatan terhadap MHA di wilayah perbatasan diantaranya adalah terkait dengan persalinan, kualitas tenaga kesehatan, tingginya dukun bayi yang tidak terlatih, air bersih yang belum tersedia, sanitasi belum memadai, kesehatan lingkungan, serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Jika kondisi demikian tidak segera diatasi dapat berdampak pada kualitas SDM yang berdomisili di wilayah perbatasan. Perlu adanya

suatu upaya-upaya peningkatan kualitas dan pengetahuan baik tenaga kesehatan maupun MHA.

Tenaga kesehatan yang berkualitas dan ditunjang dengan sarana prasarana memadai akan berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman MHA terhadap kesehatan akan membentuk sebuah kesadaran MHA akan pentingnya kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan merupakan kunci sukses pembangunan pada sektor kesehatan. Dapat dijelaskan bahwa pembangunan SDM pada sektor kesehatan menjadi salah satu kunci utama terwujudnya kesejahteraan dan kualitas SDM MHA.

Masalah lainnya adalah ketersediaan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap MHA di wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, mutlak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Kita tidak bisa berbicara soal pelayanan kesehatan yang memadai tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai pula.

Pembangunan sarana kesehatan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup MHA dan sekaligus untuk mengurangi *gap* yang sangat tinggi dengan negara tetangga yang didukung oleh sarana kesehatan yang memadai. Salah satu urgen di bidang kesehatan dan harus segera ditangani oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan. Jika tidak ada perbaikan, sangat mungkin banyak warga yang lebih memanfaatkan dukun-dukun atau mantri kesehatan yang tinggal dekat dengan mereka. Data menunjukkan presentase dukun bayi tidak terlatih lebih besar daripada yang terlatih. Salah satu dampak dari banyaknya MHA yang mengakses dukun bayi tidak terlatih adalah meningkatnya risiko kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas, serta kematian bayi.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap perlu untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Model Perlindungan

Hak atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dengan melakukan inventarisasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta mencari faktor-faktor penghambat terwujudnya perlindungan hukum MHA di daerah perbatasan Kalimantan Utara dalam kerangka hukum nasional untuk selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pembentukan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan di wilayah Perbatasan dan kebijakan untuk mendorong upaya perlindungan terhadap MHA di daerah perbatasan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana model perlindungan hak pelayanan kesehatan MHA di kawasan perbatasan Kalimantan Utara berdasarkan prinsip keadilan?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kendala dalam implementasi perlindungan hak atas kesehatan MHA di kawasan perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Prinsip Keadilan.

1. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM), sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 10 November 1948. Sebagai hak asasi, maka hak atas kesehatan ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan seluruh warga negara hidup sehat, dibarengi dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai serta pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi setiap orang.

Sementara itu *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa sehat tidak cukup bebas dari penyakit, tetapi suatu kondisi dimana badan, jiwa, dan lingkungan sosialnya

memungkinkan untuk hidup produktif secara ekonomis. Berdasarkan rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan sehat jika badan, jiwa dan lingkungan sosialnya sehat. Jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi, jelas tidak memungkinkan seseorang hidup produktif.

Menurut WHO, *Universal Health coverage* (UHC) adalah semua orang mempunyai akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa UHC merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat dalam sebuah negara. Bila rumusan di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dewasa ini maka Program BPJS Kesehatan. dapat dikategorikan sebagai program *Universal Health coverage* (UHC) Dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, seluruh penduduk diharapkan menjadi peserta jaminan kesehatan. Program BPJS Kesehatan sangat mendukung bagi pemenuhan layanan kesehatan MHA di Wilayah Perbatasan. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus berusaha supaya semua masyarakat di perbatasan dilindungi oleh program BPJS Kesehatan.

Landasan Yuridis negara untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai HAM baik dalam hukum Internasional yakni Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya maupun dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Kewajiban Negara atas kesehatan kemudian dipertegas dalam Pasal 8 UU HAM sebagai konsekwensi penandatanganan Konvensi HAM PBB.

Kebijakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak pelayanan kesehatan dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan penyembuhan. Upaya preventif dengan penciptaan lingkungan yang sehat, ketersediaan pangan yang cukup, pekerjaan, dan perumahan yang layak. Sedangkan upaya penyembuhan dilaksanakan dengan pelayanan

kesehatan yang prima. Pelayanan kesehatan yang prima akan tercapai jika didukung oleh sarana kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang berkualitas, jaminan sosial atas kesehatan, dan pembiayaan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Hal ini selaras dengan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJN) tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

MHA di wilayah Perbatasan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana warga negara lainnya yang tinggal di kota. Sesuai amanat Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas perencanaan, pengaturan, menyelenggarakan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap MHA di Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, prioritas yang segera ditangani antara lain adalah masalah pelayanan kesehatan yang optimal, ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata, serta sistem rujukan di instalasi kesehatan. Permasalahan utama dalam sistem rujukan terletak pada pelayanan kesehatan tambahan seperti Puskesmas pembantu (pustu) dan pusat kesehatan masyarakat dengan rumah sakit terdekat seperti yang ditemui di sebagian Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah tertinggal dan minim fasilitas kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak konsitusional warga negara termasuk dalam hal ini MHA yang berdomisili di daerah perbatasan. Negara wajib menyediakan sarana kesehatan dan sumber daya kesehatan bagi MHA. Apabila negara lalai dalam melaksanakan kewajiban dimaksud, maka negara dapat

dikategorikan abai terhadap kewajiban konstitusionalnya terhadap warga negaranya.

2. Model Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berkeadilan

Berdasarkan kelemahan model pelayanan kesehatan yang eksis saat ini, terasa penting mencari konsep model pelayanan kesehatan yang tidak saja mampu melepaskan diri dari perangkap pola karitatif yang meninabobokkan masyarakat, melainkan juga mampu menawarkan nilai-nilai pencerahan dan keadilan. Untuk itu ada baiknya mendasarkan pemikiran ini pada filosofi keadilan sosial yang dicetuskan oleh John Rawls. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah keberimbangan (*fairness*) yang dibangun di atas dua prinsip, yakni: *pertama*, kesetaraan hak bagi setiap orang untuk meraih kebebasan, penunaian hak dan kewajiban; *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima sejauh hal itu memberikan keuntungan besar bagi semua orang, khususnya bagi warga masyarakat yang paling kurang beruntung, serta tidak eksklusif pada segelintir orang (Fitzpatrick, 2001: 31; Hunsaker dan Hanzl, 2005:9).

Meskipun Rawls tidak menafikan fakta ketimpangan sosial ekonomi yang selalu melekat dalam setiap sistem kemasyarakatan, namun baginya hal itu adalah musuh besar keadilan sosial jika menghadirkan kerugian, sekalipun bagi sekelompok kecil anggota masyarakat. Oleh sebab itu keadilan sosial hanya bisa dicapai jika lima kondisi berikut tersedia di dalam masyarakat, yakni: *pertama*, kebebasan dasar (berpikir dan kesadaran diri); *kedua* kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan; *ketiga*, keterbukaan akses pada kekuasaan dan jabatan-jabatan pengembalian tanggungjawab; *keempat*, kemampuan untuk meraih harta dan penghasilan; *kelima*, basis bagi pertumbuhan martabat sosial (Hunsaker dan Hanzl, 2005:9).

Pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep dasar keadilan ini ke dalam pola pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Hal yang memaksa dan paling fundamental adalah unsur keadilan (*fairness*) tadi. Keberimbangan mewajibkan penyedia jasa pelayanan kesehatan dan penerima layanan

kesehatan berada dalam posisi yang sejajar, atau dengan kata lain mereka adalah mitra yang sejajar.

Mengukur posisi hubungan antara lembaga penyedia layanan kesehatan dengan pengguna layanan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, dua pertanyaan dapat diajukan berikut ini. *Pertama*, apakah posisi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan berimbang dengan lembaga penyedia layanan kesehatan terkait dengan kualitas pelayanan, pilihan perawatan dan edukasi yang tersedia, yang eksistensinya justru didukung oleh publik (secara langsung melalui pajak dan secara tidak langsung melalui reduksi alokasi anggaran penyediaan infrastruktur sosial ekonomi lainnya)? *Kedua*, sejauhmana lembaga penyedia pelayanan kesehatan baik itu negara, swasta maupun LSM, mengelola sumberdaya sosial bagi kepentingan publik berdasarkan pada prinsip keadilan,transparansi dan akuntabel? Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan menentukan bobot keadilan yang melekat dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu model pelayanan kesehatan yang berkeadilan adalah model pelayanan yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya sosial, tidak menyekatkan masyarakat, tetapi memberikan pencerahan dan memperkuat jati dirinya. Di sini pengelolaan sumberdaya sosial sebagai basis kegiatan pelayanan kesehatan perlu direorientasi ke bentuk filantropi keadilan sosial. (Social Justice Philantropy / SJP). Konsep Filantropi Keadilan Sosial merupakan praktek pemberian sumbangan kepada lembaga-lembaga nirlaba yang berupaya dalam proses perubahan struktural dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kesetaraan baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa model pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip keadilan adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan semua potensi sosial, jujur, mengedukasi, terjangkau semua lapisan masyarakat, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal, merata, prosedur yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.

Sebagai wujud perlindungan pemerintah terhadap hak kesehatan MHA di kawasan

perbatasan, maka pemerintah telah membangun 4 Rumah Sakit Pratama di Kaltara, yaitu, Rumah Sakit Pratama Krayan, Rumah Sakit Pratama Sebuku, Rumah Sakit Pratama Sebatik dan Rumah Sakit Long Ampung. Pembangunan Rumah Sakit Pratama ini atas dukungan penuh pemerintah pusat. Dengan tujuan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di perbatasan Dengan adanya Rumah Sakit Pratama, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Utamanya MHA di kawasan perbatasan.

Namun sejak selesai dibangun, Rumah Sakit Pratama belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara maksimal karena alat kesehatan yang sebagai pendukung pelayanan kesehatan belum dilengkapi. Untuk itu, Pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, pada 2019 akan mengusulkan pengadaan alat kesehatan ke pusat melalui kementerian terkait. Di antaranya, kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 65 miliar. Sesuai laporan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, usulan tersebut untuk memenuhi fasilitas di 3 Rumah Sakit pratama, yaitu Rumah Sakit Pratama Krayan, Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Rumah Sakit Pratama Long Ampung. Sedang Rumah Sakit pratama yang berada di Sebatik sudah memiliki alkes tinggal menunggu peresmiannya .

Pemenuhan alat kesehatan rumah sakit menyesuaikan dengan standar pelayanannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 56 Tahun 2014. Ada 17 item alat kesehatan yang di diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun ini agar bisa direalisasikan pada anggaran 2019. Untuk mem-*follow-up* usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui dinas terkait terus melakukan komunikasi dengan pusat. Dengan harapan, agar rencana usulan alat kesehatan ini mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait. Alat kesehatan ini sangat urgen karena memang

dua Rumah Sakit pratama yang ada di Krayan dan Sebuku sampai sekarang belum bisa beroperasi, karena tidak memiliki alat kesehatannya. Padahal kedua Rumah Sakit pratama ini merupakan pusat rujukan untuk Puskesmas di sekitar. Rumah Sakit Pratama Krayan misalnya.

Pemerintah Provinsi beserta MHA di wilayah perbatasan berharap usulan ini bisa direalisasikan pemerintah pusat sehingga rumah sakit bisa melayani MHA optimal. Jika cepat beroperasi, masyarakat yang berada di daerah perbatasan tidak perlu lagi jauh-jauh dari rumah sakit. Dengan demikian menghemat biaya kesehatan.

Berikut ini Rumah sakit Pratama di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan MHA di kawasan perbatasan adalah;

- a. Rumah Sakit Pratama Krayan, dibangun pada tahun 2013, sumber anggaran dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp 14 miliar
- b. Rumah Sakit Pratama Sebuku, Dibangun pada tahun 2014, sumber anggaran APBD Kabupaten Nunukan
- c. Rumah Sakit Pratama Long Ampung, dibangun pada tahun 2013, sumber anggaran dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp 30 miliar
- d. Rumah Sakit Pratama Sebatik, dibangun pada tahun 2017, sumber anggaran dari DAK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp 24,6 miliar.

Sebagai penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit prtama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan bantuan Alat kesehatan untuk 3 Rumah Sakit Pratama yaitu Rumah Sakit Pratama Krayan, Kabupaten Nunukan, Rumah Sakit Pratama Sebuku, Kabupaten Nunukan dan Rumah Sakit Pratama Long Ampung, Kabupaten Malinau tahun anggaran 2019 adalah:

- a. Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- b. Alat Kesehatan Ruang Operasi
- c. Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)
- d. Alat Kesehatan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)

- e. Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
- f. Alat Kesehatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
- g. Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)
- h. Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II dan III
- i. Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan
- j. Alat Kesehatan Instalasi Radiologi
- k. Alat Kesehatan Instalasi Laboratorium
- l. Alat Kesehatan Instalasi Central Strile Service Department (CSSD)
- m. Alat Kesehatan Instalasi Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)
- n. Alat Kesehatan Instalasi Laundry
- o. Alat Kesehatan Instalasi Pengelolaan Makanan (Gizi)
- p. Alat Kesehatan Instalasi Pemulasaran Jenazah
- q. Alat Kesehatan Farmasi (Pelayanan dan Gudang Farmasi)

Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Perbatasan

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah di kawasan perbatasan sejauh ini telah menunjukkan arah yang positif yakni meningkatkan kualitas kesehatan MHA secara bermakna walaupun disana sini masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan dalam implementasinya. Pembangunan kesehatan MHA di wilayah perbatasan membutuhkan SDM yang kompeten pada bidang kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang optimal.

Keterbatasan infrastruktur kesehatan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu masalah besar dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan MHA di kawasan perbatasan saat ini. Ketersediaan infrastruktur harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga pelayan kesehatan. Jika pengadaan infrastruktur kesehatan hanya bisa digapai dengan pembiayaan yang tinggi, maka solusinya anggaran kesehatan ditingkatkan oleh pemerintah baik lewat APBN maupun APBD. Jika

hal itu berat untuk di realisasikan sekarang ini, maka perlu ada opsi lain untuk penyelesaiannya.

Permasalahan kesehatan pada kawasan perbatasan adalah masalah yang sangat komprehensif dengan tantangan yang berat sehingga perlu penanganan secara komprehensif pula. Kemajuan informasi dan teknologi sehingga tidak menutup kemungkinan meningkatnya volume masyarakat dalam memilih pengobatan. Puskesmas sebagai pemberi pelayanan primer yang menjadi andalan utama pelayanan bagi masyarakat, belum mampu memberikan pelayanan optimal di daerah perbatasan. Sarana transportasi sangat terbatas dengan biaya mahal baik darat, sungai, maupun udara. Salah satu penyebabnya adalah karena kondisi geografi yang sulit serta iklim/cuaca yang sering berubah.

Penggunaan puskesmas di daerah perbatasan antara lain dipengaruhi oleh keterjangkauan (akses) pelayanan.

Rendahnya kunjungan pasien ke puskesmas sebagai bukti bahwa puskesmas sulit dijangkau oleh masyarakat karena letak geografis, kurangnya sarana transportasi serta rendahnya kemampuan masyarakat untuk membayar biaya transportasi.

Untuk menunjang penyediaan kesehatan, maka pengadaan alat kesehatan yang memadai, dan pengadaan obat-obat sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas perlu ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan alat komunikasi dan transportasi sebagai sarana penunjang dalam rangka efektifitas pelayanan kesehatan dari puskesmas kepada masyarakat. Bidan Desa di kawasan perbatasan khususnya dalam lingkup MHA mendapat beban kegiatan pengobatan dan program-program yang lain selain pada bidang Kesehatan Ibu Dan Anak. Minimnya peralatan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga bidan desa membeli sendiri peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Adanya kasus-kasus kegawatdaruratan yang dibawa ke Puskesmas dan jaringannya di Kawasan perbatasan, membutuhkan peralatan dan keterampilan khusus tenaga pelayan kesehatan dalam penanganannya. Puskesmas, pustu, dan

polindes sebagai garda terdepan untuk menangani kasus darurat, karena itu penyediaan peralatan gawat darurat perlu disediakan. Disamping itu perlu pula pemberian keterampilan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas mengoperasikan fasilitas kesehatan tersebut.

Salah satu masalah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara adalah ketersediaan pelayan kesehatan dan sarana pendukungnya masih rendah. Pelayanan kesehatan kepada MHA di Kawasan perbatasan sangat membutuhkan tenaga kesehatan baik yang bergerak di bidang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Tenaga kesehatan dimaksud masih terpusat di kota-kota besar saja. Penyebaran tenaga-tenaga kesehatan lokal harus dioptimalkan, khususnya ke daerah-daerah terpencil. Optimalisasi tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah perbatasan.

Kebijakan Pemerintah Atas Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar Di Wilayah Perbatasan

Hal ini sangat mendasar, karena kita dihadapkan pada harga diri sebagai bangsa di mata dunia Internasional. Kewajiban negara menyediakan pelayanan kesehatan kepada MHA di kawasan perbatasan Kalimantan Utara sebagai wujud tanggung jawab konstitusional negara atas hak konstitusional warga negara yakni hak kesehatan menjadi alasan paling utama, Jika solusi ini tidak dilakukan, akan menimbulkan rasa ketidakadilan dari masyarakat di perbatasan. Dan dampak jangka panjangnya adalah dapat menjadi bibit disintegrasi bangsa.

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sarana dan sarana transportasi dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan. Ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan tanpa didukung oleh alat transportasi dalam pelayanan di kawasan perbatasan, maka pelayanan kesehatan sangat sulit dilaksanakan, mengingat topografi Kalimantan Utara yang sangat sulit dijangkau. Solusi ini untuk

menjamin bahwa di manapun rakyat berada, baik dikota maupun dipedalaman dalam wilayah NKRI, pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses untuk pelayanan kesehatan. Kebijakan ini menjadi strategis untuk mencegah berpindahnya Warga Negara di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan darat dengan Malaysia, yang pelayanan kesehatannya relatif lebih baik

Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang bertugas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Sekalipun memiliki alat kesehatan penunjang yang canggi dan persediaan obat-obatan yang cukup tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas dan kompeten, maka pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka peningkatan derajat kesehatan MHA di kawasan perbatasan sulit diwujudkan. Solusi ini sangat strategis, terutama untuk mengatasi dampak akibat rendahnya kualitas tenaga kesehatan yang tersedia di di kawasan perbatasan. Jika solusi ini tidak dilakukan akan semakin dirasakan penduduk di wilayah perbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan minat tenaga kesehatan yang telah bertugas di kawasan perbatasan dan sekaligus meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan di kawasan perbatasan maka perlu kajian kebijakan sistem *reward*. Kebijakan ini sebagai solusi untuk menarik tenaga kesehatan baru agar mau bekerja dan ditempatkan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara yang terkenal medannya sangat sulit dijangkau. Langka ini juga diharapkan untuk mempertahankan tenaga kesehatan yang sudah bekerja di kawasan perbatasan agar tidak berusaha pindah tugas. Sistem *reward* tidak hanya berupa gaji atau imbalan uang yang lebih tinggi, tapi bisa berupa jenjang karir yang lebih menarik atau fasilitas pendukung yang lebih manusiawi. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketika ada rekrumen tenaga kesehatan untuk ditempatkan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, setelah bekerja beberapa tahun, mereka berusaha pindah tugas terlebih ketika mereka sudah menjadi PNS

penuh. Bila kebijakan ini tidak laksanakan, maka kekurangan tenaga kesehatan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara tetap saja akan selalu menjadi masalah. Merekrut tenaga kesehatan baru untuk ditempatkan di kawasan perbatasan hanya akan berdampak sesaat bukan solusi jangka panjang, *sustainability* tidak akan terjamin.

KESIMPULAN

Model perlindungan hak pelayanan kesehatan MHA di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang berkeadilan yakni pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dari sisi pembiayaan, didukung oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi, ditunjang oleh alat kesehatan yang memadai, obat-obatan yang cukup serta alat transportasi yang sesuai dengan medan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kendala dalam implementasi perlindungan hak atas kesehatan masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Sedangkan kendala dalam implementasi adalah kendalah letak geografis yang sulit dijangkau alat transportasi darat, sarana kesehatan yang minim, tenaga kesehatan yang belum memadai dari segi kuantitas, serta lingkungan sosial budaya masyarakat hukum adat di perbatasan yang kurang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli, Sosialisasi Hukum ter Integral dalam Sistem Hukum tanggal 9 Maret 2010 di Kupang Nusa Tenggara Timur ini merupakan kegiatan pertama dari beberapa rangkaian kegiatan Sosialisasi Hukum di tahun 2010
- Djamanat Samosir. 2013, *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Medan
- Eleanor D. Kinney, 2012, “*The International Human Right to Health*”, dalam *Indiana Law Review*, Vol 34
- LP2KD *Prov. Kaltara, Menuju Kesejahteraan Rakyat Kaltara 2014-2015*

- Martua Sirait, at.al 2010, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24
- Muladi, 2004, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, hal. 63
- Wicipto Setiadi, 2011. Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
- Philip Pettitt (1991) menyebutkan 6 tipe *unjustice* dalam konteks *justice and utility* salah satunya adalah *treating people unequally*
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, , h. 250
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

TINJAUAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI

LEGAL REVIEW OF MISUSE FIRE WEAPONS BY POLRI MEMBERS

Harum Mulia Putra¹

Fakultas Hukum

Universitas Borneo Tarakan

Email: harumkresna@gmail.com¹

ABSTRAK

Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut menghasilkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan menghasilkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum menghasilkan fungsi penegakan hukum. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokoknya tersebut, anggota polisi harus bersikap Profesional. Penyalahgunaan Senjata api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota POLRI) merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ijin memiliki dan menggunakan senjata api oleh aparat POLRI, Melalui aturan dan prosedur dengan seleksi secara ketat dan mendetail. Upaya pengawasan dan penanganan terhadap aparat POLRI yang terlibat tindak penyalahgunaan senjata api akan diterapkan sanksi Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dapat dijelaskan bahwa Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku seperti halnya hukum positif (tertulis). Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan tentang pelatihan dan ujian khusus penggunaan kekerasan dan senjata api dalam prinsip menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang (atasan/pimpinan) harus memastikan serta menjamin bahwa polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang menggunakan kekerasan dan senjata api.

Kata Kunci: Pelatihan, Penyalahgunaan, POLRI, Senjata Api

ABSTRACT

The police in Indonesia have two powers namely power in the field of government and power in the field of law. From these two powers produced three functions of the police. Power in the field of government produces the functions of service and public order, while power in the field of law produces the function of law enforcement. In carrying out and carrying out its main duties, police officers must be professional. The misuse of firearms by members of the Indonesian National Police (POLRI members) is an act against the law that is not in accordance with the applicable rules and laws, permit to own and use firearms by the Indonesian National Police (POLRI), through strict and detailed selection of rules and procedures. Efforts to supervise and handle police officers (POLRI) involved in the misuse of firearms will be subject to legal sanctions. Methods used in this study is juridical normative. Can be explained that juridical normative is the research law be assessed based on the norm applicable law as well as positive law (written). The results of this study are the provisions regarding training and special tests on the use of force and firearms in the basic principle stating that the government and the authorities (superiors / leaders) must ensure and guarantee that the police must be equipped with adequate skills and abilities in the use of violence and weapons fire.

Keyword: Training; Misuse, Police (POLRI), Firearms

PENDAHULUAN

Esensial fungsi kepolisian yaitu aparat penegak hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak tindakan operasional POLRI

melanggar HAM namun dengan alasan melaksanakan tugas akan menjadi sah, dimana studi kasus yang terlibat dalam Institusi Kepolisian secara langsung.

Polisi telah mengeluarkan peraturan internal yang ditegaskan mengenai standar-standar HAM dalam operasi kinerja aparat kepolisian.

Aksi kejahatan yang semakin marak saat ini membuat tugas polisi semakin berat. Polisi dibidang reserse berfungsi sebagai penegak hukum di bidang Kriminal. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Prosedur formal Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kebijakan di lapangan menentukan tindakan seorang polisi. Pada satuan kerja POLRI adapun contoh kebijakan formal dan informal yang bersifat situasional.

Berdasarkan adanya kenyataan diataslah yang mendorong penulis dalam menyusun proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota POLRI.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki tentang *Penelitian Hukum* Tahun 2013, berpendapat bahwa penelitian hukum (*legal research; rechtsonderzoek*): merupakan proses ilmiah yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang muncul. Penelitian ini untuk kepentingan dibidang akademisi dalam bentuk skripsi yang terkait dengan substansinya dan merupakan penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota polri yang akan menggunakan senjata api. Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang

Pendaftaran dan Pemberian Izin. Diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: *“Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”*.

Pembahasan

Sementara itu, jika penyalahgunaan senjata api terjadi, maka laporan, pengaduan dan/atau informasi masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Unit Paminal yang memang bertugas dalam internal kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian yang terbukti melanggar, yaitu :

1. Pemberian *sanksi pidana*.
2. Pemberian *sanksi disiplin*
3. Pemberian *Sanksi Kode Etik Profesi Polri*.

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api nontugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dari seluruh penjelasan dan uraian yang telah diberikan di penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Aturan dan Prosedur Senjata api oleh anggota kepolisian hanya digunakan dalam keadaan darurat.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: *“Dalam menerapkan tugas*

pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas". Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, dicantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: "*setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan beberapa hal.*" Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmawan, M. Kemal, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketujuh, Januari 2017.
- Djoko Prakoso, SH. "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 1987.
- DR. Andi Hamzah, SH. "*Asas Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harkrisnowo, Harkristuti, dkk, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketiga, November 2016.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. "*Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S., *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan keenam, Mei 2017.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta, 2008.
- , *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. Ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2013.
- Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri (Studi Polda Sumut)*. FH USU, Medan
- Sadjijono, M. Khoidin, *Kriminolog Asal Amerika Serikat*, 2007.
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.
- Sutanto, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan kedua belas, Juni 2015.
- Umam, Khotibul, Rimawati, dan Suryana Yogaswara, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketiga, Mei 2017.
- Moeljatno, *Perbedaan dan persamaan antara pelanggaran dengan kejahatan*, 2000.
- Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum. dan Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H., CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, Cetakan Pertama, Mei 2017.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama Kompas gramedia Building, Jakarta, Cetakan Pertama, Jakarta 2017.
- Peraturan Pemerintah, *tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 1 Tahun 2001, 1 Januari 2003.
- Peraturan Pemerintah, *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Nomor 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003.

- Peraturan Kepala Kepolisian, *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Nomor 14 Tahun 2011, 1 Oktober 2011.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*, Nomor 1 Tahun 2009, 13 Januari 2009.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*, Nomor 8 Tahun 2012, 27 Februari 2012.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api Nonorganik tentara indonesia/kepolisian negara republik indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata api bagi pengembian fungsi kepolisian lainnya*, Nomor 11 Tahun 2017, 26 Juli 2017.
- Surat Telegram Kapolri, *tentang Jenis Senjata Api Organik Polri serta Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api Organik Polri*, No Pol. ST / 723 / VI / 2005, 30 Juni 2005.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan*, No. Pol. : SKEP/297/V/2005, 17 Mei 2005.
- Surat Telegram Kapolda Kalimantan Utara, *Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api*, No : ST/45/III/PSI.1.2./2009, 08 September 2019.
- Surat Telegram Kapolda Kaltim, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Khususnya Kepada Anggota Yang Melaksanakan Tugas Dilapangan Yang Menggunakan Senjata Api*, Nomor : ST/1866/ VIII/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016.
- Surat Telegram Kapolda Kaltim, *Tentang Pedoman Dan Petunjuk Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Diluar Tugas Atau Non Tugas*, No. Pol : TR/ 16/ I/ 2004, Januari 2004.
- Surat Telegram Kapolres Tarakan, *Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Sebelum Pelaksanaan Tugas Anggota Polri Dilapangan*, No. Pol : STR/ / X/ 2017 Tanggal 12 Oktober 2017, h. 1-2.

**STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
RAKYAT DESA PUNAN MALINAU KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU**

***HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES ON OIL PALM PLANTATION OF THE
PEOPLE IN PUNAN MALINAU VILLAGE, SEGAH DISTRICT, BERAU REGENCY***

Nia Kurniasih Suryana¹, Eliaser²
Fakultas Pertanian
Universitas Borneo Tarakan
Email: zlynia@gmail.com¹

ABSTRAK

Saat ini sebagian besar sumber daya manusia yang mendukung sektor perkebunan masih rendah kualitasnya. Bagian terbesar adalah bahwa petani memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini menyebabkan kemampuan petani perkebunan yang ada untuk menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif sangat terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsi strategi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di perkebunan kelapa sawit rakyat desa Punan Malinau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada. Penelitian ini kuantitatif deskriptif. Sumber informasi dalam kajian ini terbagi menjadi dua, yaitu informan sebanyak 10 orang yang ditentukan oleh metode purposive dan 105 petani yang menjadi responden dengan penentuan metode insidental sampling. Analisis data teknik yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi sumber daya manusia yang ada di perkebunan kelapa sawit rakyat desa Punan Malinau ada di kuadran I dimana strategi yang dapat digunakan adalah strategi agrisif dengan menggunakan faktor S-O adalah strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kesempatan. Para peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dapat digunakan adalah untuk melakukan studi banding oleh pemerintah daerah untuk petani kelapa sawit, meningkatkan program penyuluhan pertanian di desa Punan Malinau, menciptakan program CSR dari perusahaan dalam mengembangkan sumber daya petani, terus memperluas bisnis pertanian kelapa sawit disertai dengan agen perpanjangan. Saran yang diberikan para peneliti dalam penelitian ini lebih baik untuk mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dalam hal pengembangan bakat dan keterampilan petani dalam hal pertanian kelapa sawit.

Kata Kunci: Strategi Pembangunan, Sumberdaya Manusia, Analisis SWOT

ABSTRACT

Today most of the human resources supporting the plantation sector are still low in quality. The biggest part is that farmers have a low level of formal education or do not complete basic education. This causes the ability of existing plantation farmers to absorb information and adopt technology is relatively very limited. The purpose of this study is to analyze and decrypt the strategy in human resource development efforts (HR) In the palm oil plantation of the people of Punan Malinau Village. The results of this study are expected to be useful for the development of existing human resources. This research is quantitative descriptive. The source of information in this study is divided into two, namely informants as many as 10 people who are determined by the method of purposive and 105 farmers who become respondents with determination by incidental sampling method. Data analysis technique used is SWOT analysis. The results of this study indicate that the existing Human Resources situation in the palm oil plantation of the people of Punan Malinau Village is in quadrant I where the strategy that can be used is the agrisif strategy by using the S-O factor is the strategy by using the power to get the opportunity. The researchers concluded that the strategy that can be used is to conduct a comparative study by local government for oil palm farmers, Improving agricultural extension program in Punan Malinau Village, Creating a CSR program from the company in developing human resources of farmers, Continuously expanding the oil palm farming business in accompanied by the extension agent. The

suggestions that researchers provide in this study is better to optimize the extension activities in terms of developing talent and skills of farmers in terms of oil palm farming.

Keyword: Development Strategy, Human Resources, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kontribusi tersebut terletak pada peranan sektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan pangan, pakan dan bioenergi, sumber penerimaan devisa negara serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Salah satu komoditi unggulan yang ada di Indonesia sekarang ini adalah komoditi kelapa sawit hal ini dapat di lihat bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor indonesia yang menghasilkan devisa yang besar untuk negara, dimana terdapat investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk membuka usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam usaha peningkatan usaha agribisnis kelapa sawit sangat penting untuk meningkatkan usaha tani kelapa sawit rakyat agar dapat berkontribusi menyumbang pasokan bahan menta ke pabrik-pabrik yang ada.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Salah satu permasalahan mendasar di bidang perkebunan adalah keterbatasan kualitas SDM bidang pertanian. Sarwono (2001) Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Peningkatan SDM tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani. Namun, juga peningkatan kemampuan atau kualitas petani. Pada era globalisasi saat ini pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia

sektor perkebunan sangat penting guna untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Mengingat pentingnya peran pengembangan Sumber Daya Manusia maka pengembangannya tidak lagi hanya tergantung pada masyarakat tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Desa Punan Malinau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Segah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mengembangkan usaha agribisnis kelapa sawit. Rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha agribisnis kelapa sawit yang ada dan pemberdayaan diharapkan mampu membawa perubahan agar petani dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah 1). Untuk mengetahui faktor Internal dan Eksternal dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Punan Malinau. 2). Untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan SDM pada usaha perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Punan Malinau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau . Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember (2017) - Juli (2018) mulai dari pembuatan proposal, sampai penyerahan skripsi.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan ini terbagi menjadi dua yaitu informan dan responden. Informan di tentukan secara sengaja (Purposive sampling). Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau yang di tentukan dengan metode insidental sampling. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan koesioner, wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka.

Adapun Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sugiono (2009) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat penggambaran/ pencandraa mengenai situasi atau kejadian-kejadian dengan mencari informasi faktual yang mendetail untuk memecahkan masalah secara sistematis dan akurat. Matriks SWOT merupakan alat pencocokan strategi yang dilakukan berdasarkan pengembangan empat jenis strategi, yaitu *S-O Strategy* (Strategi Kekuatan-Peluang), *S-T Strategy* (Strategi Kekuatan-Ancaman), *W-O Strategy* (Strategi Kelemahan-Peluang), dan *W-T Strategy* (Strategi Kelemahan-Ancaman). *S-O Strategy* memanfaatkan kekuatan internal dari SDM petani untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. *S-T Strategy* menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. *W-O Strategy* memperbaiki kelemahan SDM petani kelapa sawit dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. *W-T Strategy* merupakan taktik *defensif* yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan SDM petani kelapa sawit serta menghindari ancaman eksternal.

Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) ditujukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan mengukur sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, sedangkan matriks *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS) di tujukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal dan mengukur sejauh mana peluang dan ancaman yang dihadapi daerah (Damelia 2015).

Adapun cara untuk mendapatkan nilai rating serta bobot dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Rating} = \frac{\text{Total jawaban tiap faktor}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Bobot/responden} = \frac{\text{Skor jawaban responden}}{\text{Total jawaban Responden}}$$

$$\text{Bobot} = \frac{\text{Total bobot semua responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Berau merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan timur dengan luas wilayah adalah 34.127,17 km² yang terdiri dari daratan seluas 21.951,5 Km² dan luas lautan 11.162,42 Km². Jika di tinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur luas wilayah Kabupaten Berau 13,92% dari luas Kalimantan Timur. Secara astronomis Kabupaten Berau terletak antara 116⁰Bujur Timur sampai dengan 1190⁰Bujur Timur dan 1⁰Lintang Utara sampai dengan 233⁰ Lintang Selatan.

Desa Punan Malinau merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang di bentuk pada tahun 1970. Secara Giografis Desa Punan Malinau Terletak pada kuadran Bujur Timur (BT) 116⁰ Dan 236⁰⁰ Lintang Utara. Secara topografi Desa Punan Malinau terdiri dari dataran tinggi dengan perbukitan berada dibagian utara sedangkan dibagian selatan cenderung datar dan semakin menuju perbukitan kearah sampai ketinggian sekitar 400 mdpl. Secara administrasi Desa Punan Malinau berbatasan dengan Kabupaten Bulungan sebelah Utara, Desa Long Ayan dan Desa Tepian Buah bagian selatan dan Desa Long Ayap bagian barat. Adapun luas wilaya desa Punan Malinau sekitar 301.339.100 m². Adapun penduduk yang berada di Desa Punan Malinau merupakan suku Dayak Kenya Lepo Tepu yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal SDM

Analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan SDM dan faktor yang dapat di gunakan dalam hal pengembangan sumber daya manusia tersebut. Adapun data-data yang di kumpulkan peneliti dari informan di daerah

penelitian di klasifikasi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Hasil klasifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dipilih untuk

mendapatkan masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan (faktor internal), faktor peluang dan ancaman (faktor eksternal) yang diasumsi paling berpengaruh atau kuat.

Tabel 1. Faktor Internal SDM di perkebunan kelapa sawit rakyat Desa Punan Malinau

NO	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1	Usia Petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau merupakan usia yang masih produktif dalam budidaya kelapa sawit (S ₁)	Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki petani kelapa sawit yang ada di Desa Punan Malinau (W ₁)
2	Hubungan kerja sama antar petani kelapa di Desa Punan Malinau masih tinggi (S ₂)	Kurangnya penggunaan teknologi pertanian oleh petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau. (W ₂)
3	Minat/motivasi masyarakat petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau tinggi dalam membudidayakan kelapa sawit (S ₃)	Tidak adanya lembaga pertanian yang dimiliki oleh petani di Desa Punan Malinau (W ₃)
4	Tingginya loyalitas petani yang ada di Desa Punan Malinau terhadap usaha budi daya kelapa sawit(S ₄)	Kurangnya pengalaman bertani yang dimiliki petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau (W ₄)

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Tabel 2. Faktor Eksternal SDM di perkebunan kelapa sawit rakyat Desa Punan Malinau

NO	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Adanya dukungan dari pihak perusahaan swasta yang ada disekitar Desa Punan Malinau (O ₁)	Harga kelapa sawit yang tidak stabil (T ₁)
2	Adanya lembaga Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di kecamatan seghah (O ₂)	Adanya petani dari luar yang berusaha tani kelapa sawit di daerah desa Punan Malinau (T ₂)
3	Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas (O ₃)	Minimnya akses informasi yang ada di Desa Punan Malinau(T ₃)
4	Adanya dukungan dari pemerintah setempat yaitu dari pihak Desa (O ₄)	Masih kuatnya budaya adat di Desa Punan Malinau (T ₄)

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Berdasarkan tabel tabel diatas faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan dijelaskan sebagai unsur keunggulan sumber daya manusia yang ada. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh SDM di perkebunan kelapa sawit rakyat Desa Punan Malinau yang dapat digunakan dalam pengembangan SDM itu sendiri terdapat 4 faktor.

Adapun faktor eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Peluang dijelaskan sebagai situasi diluar SDM yang menguntungkan bagi pengembangan sumber daya manusia. Faktor peluang pada pengembangan sumber daya manusia terdapat 4 faktor.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih fleksibel mengenai analisis SWOT maka perlu menggunakan tabel faktor-faktor internal dan eksternal yang di ajukan kepada responden guna

untuk menentukan nilai rating dan bobot dari setiap faktor internal maupun eksternal. Adapun nilai bobot dan rating dari setiap faktor internal

dan eksternal berdasarkan jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rating dan bobot pada faktor internal SDM

NO	FAKTOR	RATING	BOBOT	SKOR
KEKUATAN				
1	Usia Petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau merupakan usia yang masih produktif dalam bukididaya kelapa sawit (S ₁)	2	0,12	0,24
2	Hubungan kerja sama antar petani kelapa di Desa Punan Malinau masih tinggi(S ₂)	3	0,15	0,45
3	Minat/motivasi masyarakat petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau tinggi dalam membudidayakan kelapa sawit (S ₃)	3	0,17	0,51
4	Tingginya loyalitas petani yang ada di Desa Punan Malinau terhadap usaha budi daya kelapa sawit(S ₄)	3	0,14	0,42
			1,62	
KELEMAHAN				
1	Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki petani kelapa sawit yang ada di Desa Punan Malinau (W ₁)	1	0,07	0,07
2	Kurangnya penggunaan teknologi pertanian oleh petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau. (W ₂)	2	0,12	0,24
3	Tidak adanya lembaga pertanian yang dimiliki oleh petani di Desa Punan Malinau (W ₃)	2	0,11	0,22
4	Rendahnya pengalaman bertani yang dimiliki petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau (W ₄)	2	0,11	0,22
				0,75
TOTAL			1.00	2,37

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor motivasi yang dimiliki oleh para petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau merupakan faktor yang berpengaruh paling kuat di antara faktor internal yang ada pada Sumber Daya

Manusia(SDM) kelapa sawit di Desa Punan Malinau. Hal ini dapat dilihat dari rating sebesar 3 dan bobot 0,17 serta skor 0,51 dan hal ini dapat dikatakan bahwa faktor tersebut merupakan faktor yang sangat penting diantara faktor yang lainnya.

Tabel 4. Rating dan bobot pada faktor eksternal SDM

NO	FAKTOR	RATING	BOBOT	SKOR
PELUANG				
1	Adanya dukungan dari pihak perusahaan swasta yang ada disekitar Desa Punan Malinau (O ₁)	3	0,16	0,48
2	Adanya lembaga Balai Penyuluhan Pertanian, Pertaniandan Kehutanan (BP3K) di kecamatan seghah (O ₂)	3	0,17	0,51
3	Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas (O ₃)	2	0,12	0,24
4	Adanya dukungan dari pemerintahhan setempat(O ₄)	3	0,13	0,39
				1,62
ANCAMAN				
1	Harga kelapa sawit yang tidak stabil (T ₁)	2	0,12	0,24
2	Adanya petani dari luar yang berusaha tani kelapa sawit di daerah desa Punan Malinau (T ₂)	2	0,08	0,16
3	Minimnya akses informasi yang ada di Desa Punan Malinau (T ₃)	3	0,12	0,36
4	Masih kuatnya budaya adat di Desa Punan Malinau (O ₄)	2	0,12	0,24
				1
TOTAL				2,62

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Adanya lembaga Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) di kecamatan seghah merupakan faktor yang berpengaruh paling kuat di antara faktor eksternal yang ada pada Sumber Daya Manusia(SDM)

kelapa sawit di Desa Punan Malinau. Hal ini dapat dilihat dari rating sebesar 3 dan bobot 0,17 serta skor 0,51 dan hal ini dapat dikatakan bahwa faktor tersebut merupakan faktor yang sangat penting diantara faktor yang lainnya.

Analisis Kuadran didapatkan dengan melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W dan faktor O dengan T. Perolehan angka S dengan W selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka O dengan T selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y. berdasarkan tabel pembobotan faktor

internal dan faktor eksternal diatas dapat di tentukan titik kordinat sumbu X dan sumbu Y.

$$X = S + (-W)$$

$$X = 1,62 + (-0,75)$$

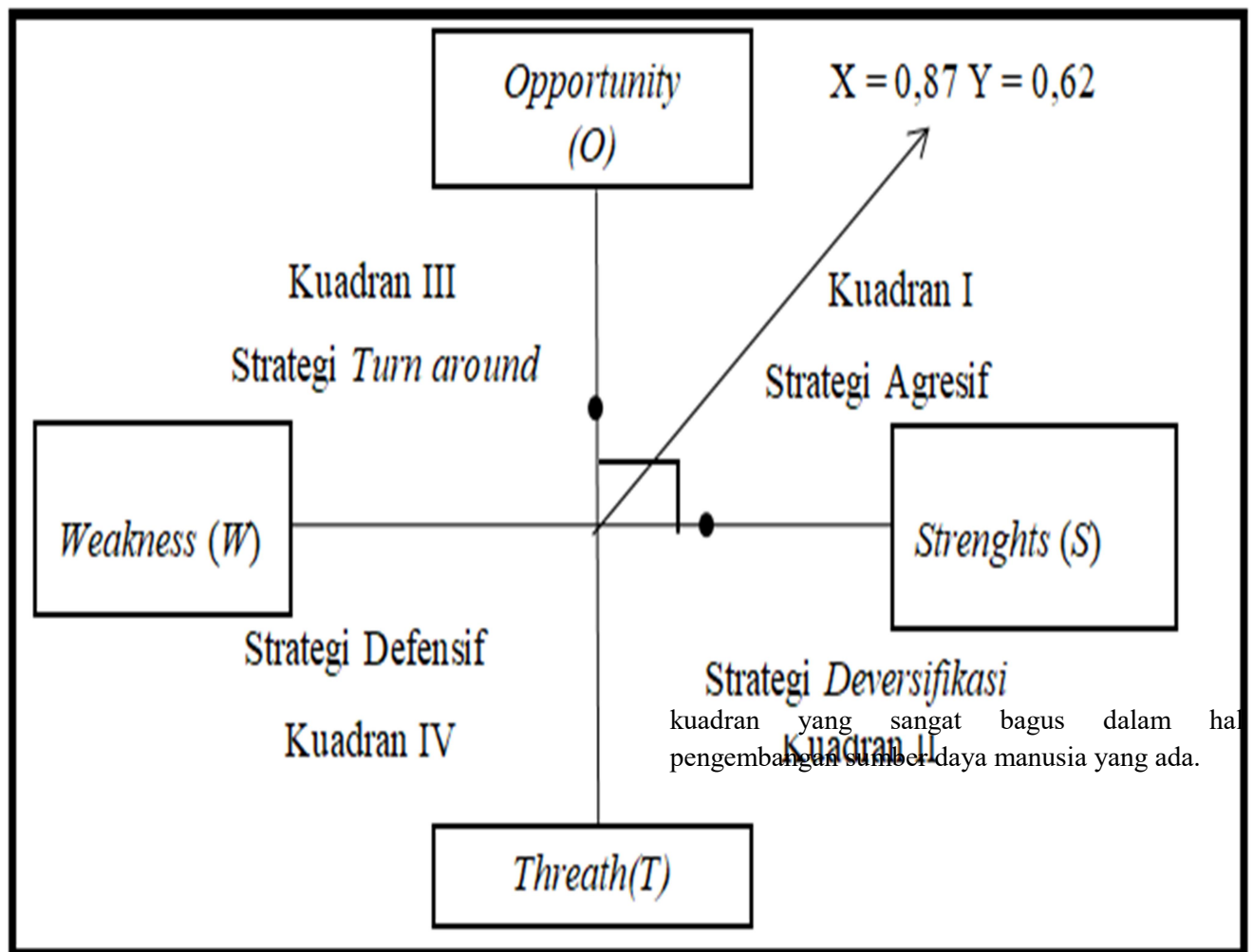
$$X = \mathbf{0,87}$$

$$Y = O + (-T)$$

$$Y = 1,62 + (-1)$$

$$Y = \mathbf{0,62}$$

Gambar 1. Kuadran Strategi Pengembangan



kuadran yang sangat bagus dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan Gambar di atas posisi X dan Y berada pada kuadran I sehingga rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi agresifartinya SDM yang ada di Perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Punan Malinau memiliki kekuatan serta peluang dalam pengembangannya. Kuadran ini merupakan

Analisis Matrik SWOT Pengembangan SDM
 Setelah melakukan analisis dengan pemberian nilai bobot dan rating dan rekomendasi strategi analisis kuadran, selanjutnya dilakukan penetapan strategi dengan penggabungan faktor internal dan eksternal.

Tabel 5. Matriks analisis SWOT pengembangan SDM di perkebunan kelapa sawit rakyat Desa Punan Malinau

FAKTOR IFAS FAKTOR EFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia Petani kelapa sawit merupakan usia yang masih produktif dalam bukidaya kelapa sawit (S₁) 2. Hubungan kerja sama antar petani masih tinggi(S₂) 3. Minat / motivasi tinggi dalam membudidayakan kelapa sawit (S₃) 4. Tingginya loyalitas petani terhadap pekerjaannya sebagai usaha budi daya kelapa sawit(S₄) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki petani (W1) 2. Kurangnya penggunaan teknologi pertanian oleh petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau. (W2) 3. Tidak adanya lembaga pertanian yang dimiliki oleh petani di Desa Punan Malinau (W3) 4. Rendahnya pengalaman bertani yang dimiliki petani kelapa sawit di Desa Punan Malinau (W4)
Peluang(O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pihak perusahaan swasta yang ada disekitar Desa Punan Malinau (O₁) 2. Adanya lembaga Balai Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan (BP3K) di kecamatan seghah (O₂) 3. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas (O₃) 4. Adanya dukungan dari pemerintah setempat yaitu dari pihak Desa (O₄) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program penyuluhan pertanian di Desa Punan Malinau .(S₂,S₃,O₂,O₃,O₄). 2. Membuat suatu program CSR dari pihak perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia petani.(S₁,S₃,S₄O₁,O₄) 3. Membentuk lembaga kelompok tani serta koperasi bagi petani (S₁,S₂,S₃,O₂,O₄) 4. Terus memperluas usaha tani kelapa sawit di dampingi oleh pihak penyuluh.(S₁,S₂,S₃,O₄) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah dalam pengadaan teknologi pertanian(W₂,O₁,O₄) 2. Memberikan bantuan berupa bentuk Faktor produksi untuk mengembangkan usaha petani kelapa sawit(W₃,O₁,O₄)
Ancaman(T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga kelapa sawit yang tidak stabil (T₁) 2. Adanya petani dari luar daerah (T₂) 3. Minimnya akses informasi yang ada (T₃) 4. Masih kuatnya budaya adat di Desa Punan Malinau (T₄) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses informasi dan pendampingan mengenai harga jual kelapa sawit dipasaran kepada petani (S₁,S₂,S₃,T₁,T₃). 2. Bekerja sama dengan petani luar dalam hal pemasaran (S₁,S₂,S₄,T₂,T₄) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan penggunaan teknologi pertanian (W₁,W₃,W₄,T₂,T₄); 2. Membentuk lembaga penyedia input budidaya kelapa sawit oleh (Bumdes & Koperasi) (W₂,W₃,T₁,T₄)

Berdasarkan analisis kuadran yang ada di dapatkan bahwa strategi yang paling tepat untuk di gunakan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perkebunan kelapa sawit rakyat adalah strategi agresif yang berada pada kuaran I. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah:

Meningkatkan program penyuluh pertanian di Desa Punan Malinau.

Penyuluhan mempunyai peran yang sangat dalam pembangunan pertanian karena penyuluhan merupakan proses pendidikan non pormal yang bertujuan untuk merubah perilaku petani kearah yang lebih baik. Dengan umur yang masih produktif serta motivasi dan loyalitas yang dimiliki petani kegiatan penyuluhan dalam upaya peningkatan kualitas SDM sangat perlu dilakukan. Dimana Usia produktif merupakan usia

ideal untuk bekerja dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan teknologi yang inovatif di bidang pertanian. Hal ini selaras dengan pernyataan (Mardikanto 2005) Kegiatan penyuluhan merupakan satu di antara upaya yang cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan, mengajarkan keterampilan, dan menyadarkan masyarakat petani kelapa sawit yang ada di Desa Punan Malinau memanfaatkan sumberdaya alam melalui pendidikan non formal oleh para penyuluh.

Mengutamakan program CSR dari pihak perusahaan dalam pengembangan SDM dengan melakukan pelatihan khusus bagi para petani.

Dalam usaha pengembangan sumber daya manusia pertanian saat ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah tetapi peran dari pihak swasta sangat di perlukan. Setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun dalam menjalankan kelangsungan perjalanan perusahaannya diperlukan sebuah tanggung jawab sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial agar perusahaan bukan saja menjadi bagian yang bertanggung jawab kepada pemiliknya. Strategi yang di maksud dalam penelitian ini adalah membuat program CSR dari pihak perusahaan yang dapat meningkatkan keterampilan para petani seperti memberi bantuan teknologi serta membuat pelatihan pengembangan keterampilan dari pihak perusahaan.

Terus memperluas lahan usaha tani kelapa sawit oleh petani

Pengembangan agribisnis kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor

perkebunan dalam rangka revitalisasi sektor pertanian. Peluang untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit masih cukup terbuka bagi para petani yang ada di Desa Punan Malinau, terutama karena ketersediaan sumberdaya alam/lahan yang cukup luas.

KESIMPULAN

Adapun strategi yang di didapatkan dari hasil penelitian ini adalah strategi agresif dimana strategi ini merupakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang. Strategi yang di

rekomendasikan adalah sebagai berikut: 1).Melakukan kegiatan studi banding oleh pemerintah setempat untuk para petani kelapa sawit 2).Meningkatkan program penyuluhan pertanian di Desa Punan Malinau 3).Membuat suatu program CSR dari pihak perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia petani.4).Terus memperluas usaha tani kelapa sawit di dampingi oleh pihak penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Edisi 1 Cetakan 1. UNS Press. Surakarta.
- Damelia. 2015. Manajemen Strategis Konsep Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.
- Sarwono. (2010). Studi Pengembangan Usaha Perkebunan Di Kota Medan. Medan: USU Press.
- Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Metodologi penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.

